

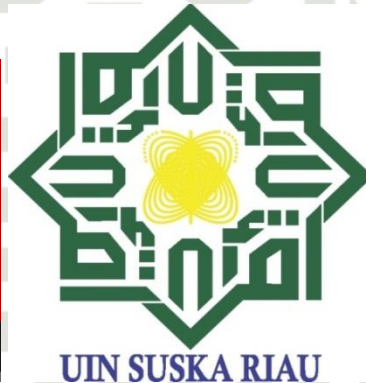
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM  
MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF  
(STUDI PADA BMT MARWAH DAN BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR)**

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  
Ekonomi (ME) pada Program Studi Ekonomi Syariah

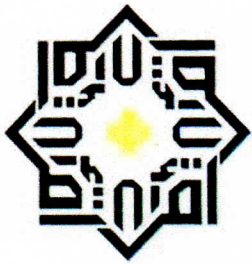


Oleh :

**MIFTA HASDA**

**NIM : 21890320035**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM PASCA SARJANA (PPS)**  
**JUUNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1442 H./2021 M.**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

## Lembar Pengesahan

Nama : Mifta Hasda  
Nomor Induk Mahasiswa : 21890320035  
Gelar Akademik : M.E. (Magister Ekonomi)  
Judul : Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam  
Mengimplementasikan Keuangan Inklusif (Studi pada BMT  
Marwah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten  
Kampar)

Tim Penguji: **Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**  
Penguji I/Ketua

**Dr. Yanti, M.Ag**  
Penguji II/ Sekretaris

**Dr. Julina, SE, M.Si**  
Penguji III/

**Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/ Pengesahan: 15 Februari 2021

## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul ***“Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif (Studi Pada BMT Marwah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZANAS) Kabupaten Kampar)”*** yang ditulis oleh saudara:

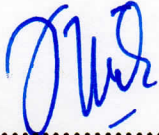
Nama : Mifta Hasda  
NIM : 21890320035  
Program Studi : Ekonomi Syari’ah (S2)

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 15 Februari 2021.

Penguji I,

**Dr. Julina, SE., M.Si**


NIP. 19730722 199903 2 001

  
.....  
Tgl. 19 / 02 / 2021

Penguji II,

**Dr. Mahendra Romus, S.P., M.Ec**

NIP. 19711119 200501 1 004

  
.....  
Tgl. 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syari’ah

  
**Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si**  
NIP. 19640508 199303 2 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif (Studi Pada BMT Marwah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZANAS) Kabupaten Kampar)”.

Dengan segala kesadaran penulis bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta Ayahanda Drs. H. Darlis dan Ibunda Hazlinda, serta suami Mahadir M. SE yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta doa yang tak hentinya kepada penulis.
2. Bapak Direktur Pasca Sarjana Prof. Dr. Afrizal, M. MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Pasca Sarjana UIN SUSKA RIAU
3. Ibu Dr. Hj. Sitti Rahma, M. Si, selaku ketua prodi Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Yanti, M,Ag selaku sekretaris prodi Ekonomi
5. Bapak Dr.Drs.H Muh Said, HM., M.Ag, MM selaku pembimbing I yang telah membimbing dan banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Dr. Julina , SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing dan banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen Pasca Sarjana UIN SUSKA RIAU jurusan Ekonomi Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu.
8. Bapak Ir. H. Basri Rasyid, MM, MT selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepada pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar yang banyak membantu penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini.
10. Bapak Dodi Hendra Saputra, S.Pdi selaku Pimpinan Kantor Cabang Utama BMT Marwah yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian.
11. Kepada pegawai BMT Marwah banyak membantu penulis dalam memperoleh data untuk penelitian ini.
12. Kepada Putri tercinta Megumi A. Radirta, Ibu Ruhaida, adek – adek, seluruh keluarga yang telah memberikan yang yang terbaik
13. Untuk teman – teman pasca sarjana Ekonomi Syariah 2018 yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

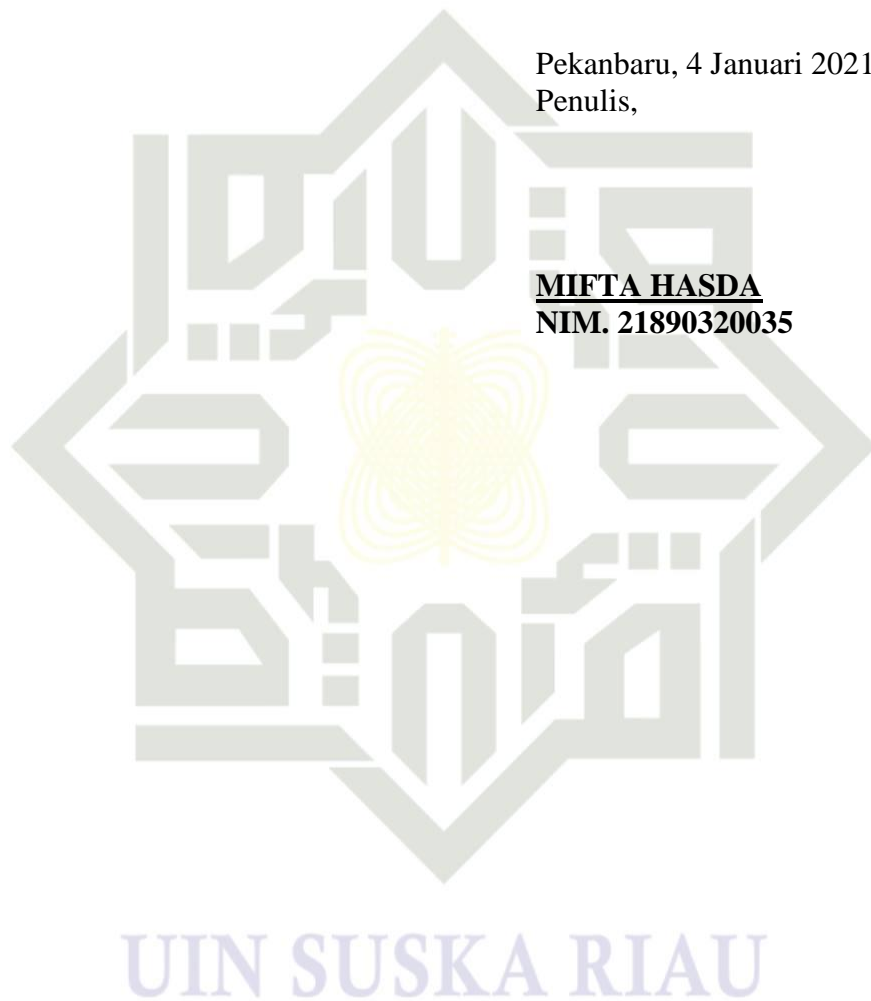
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terakhir segala jasa dan budi baik dari semua pihak yang tersebut diatas penulis mengucapkan terima kasih. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal soleh dan mendapatkan balsan dari Allah SWT, aamiin....

Pekanbaru, 4 Januari 2021  
Penulis,

**MIFTA HASDA**  
**NIM. 21890320035**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PERSETUJUAN</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING 1</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING 2</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	11
a. Identifikasi masalah .....	12
b. Batasan masalah .....	13
c. Rumusan masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	14
E. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>16</b>
A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah .....	16
B. BMT ( <i>BAITUL MAL WAT TAMWIL</i> ) .....	20
a. Pengertian BMT dan Sumber Hukum.....	20
b. Peran BMT .....	26
c. Pemasaran BMT .....	28



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lembaga Amil Zakat (LAZ) .....	30
a. Lembaga Amil Zakat Di Indonesia dan Sumber Hukum....	30
b. Inklusi Zakat.....	42
D. Inklusi Keuangan .....	46
a. Pengertian Inklusi Keuangan .....	46
b. Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif.....	49
c. Indikator Keuangan Inklusif .....	51
E. Penelitian Terdahulu .....	52

**BAB III METODE PENELITIAN .....** **56**

A. Jenis Penelitian .....	56
B. Tempat Penelitian .....	56
C. Subjek Dan Objek Penelitian .....	57
D. Sumber Data .....	58
E. Teknik Pengumpulan Data .....	58
F. Teknik Analisis Data .....	59
G. Rencana Out line .....	61

**IV HASIL PENELITIAN .....** **64**

A. UPAYA BMT MARWAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF .....	64
B. UPAYA BAZNAS KAB. KAMPAR DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF .....	76

C Hambatan dan Solusi dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusi .....	93
--	----

**V PENUTUP .....** **96**

A KESIMPULAN .....	96
B SARAN.....	97

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL II.1</b>	Penelitian Terdahulu .....	52
<b>TABEL IV.1</b>	Pengurus dan Pengawas BMT Marwah .....	64
<b>TABEL IV.2</b>	Karyawan Kantor Cabang Utama .....	65
<b>TABEL IV.3</b>	Karyawan Kantor Cabang Bina Baru .....	66
<b>TABEL IV.4</b>	Karyawan Kantor Cabang Indrapura .....	66
<b>TABEL IV.5</b>	Karyawan Kantor Cabang Paus - Pekanbaru .....	66
<b>TABEL IV.6</b>	Bagi Hasil Tabungan Berjangka .....	70
<b>TABEL IV.7</b>	Implementasi Keuangan Inklusif di BMT Marwah .....	74
<b>TABEL IV.8</b>	Penerimaan Infaq Dari Tahun 2016 – 2019 .....	83
<b>TABEL IV.9</b>	Penerimaan Zakat Fitrah Dari Tahun 2016 – 2019 .....	83
<b>TABEL IV.10</b>	Penerimaan Zakat Maal Tahun 2016 - 2019 .....	84
<b>TABEL IV.11</b>	Total Penerimaan Zakat Infak Sedekah Tahun 2016 – 2019 .....	84
<b>TABEL IV.12</b>	Pendistribusian Program Kamar Makmur Tahun 2019 .....	94
<b>TABEL IV.13</b>	Pendistribusian Program Kamar Sehat Tahun 2019 .....	94
<b>TABEL IV.14</b>	Pendistribusian Program Kamar Cerdas Tahun 2019 .....	95
<b>TABEL IV.15</b>	Pendistribusian Program Kamar Taqwa Tahun 2019 .....	96
<b>TABEL IV.16</b>	Pendistribusian Program Kamar Peduli Tahun 2019 .....	96
<b>TABEL IV.17</b>	Implementasi Zakat Inklusif di BAZNAS Kab. Kampar .....	97

UIN SUSKA RIAU

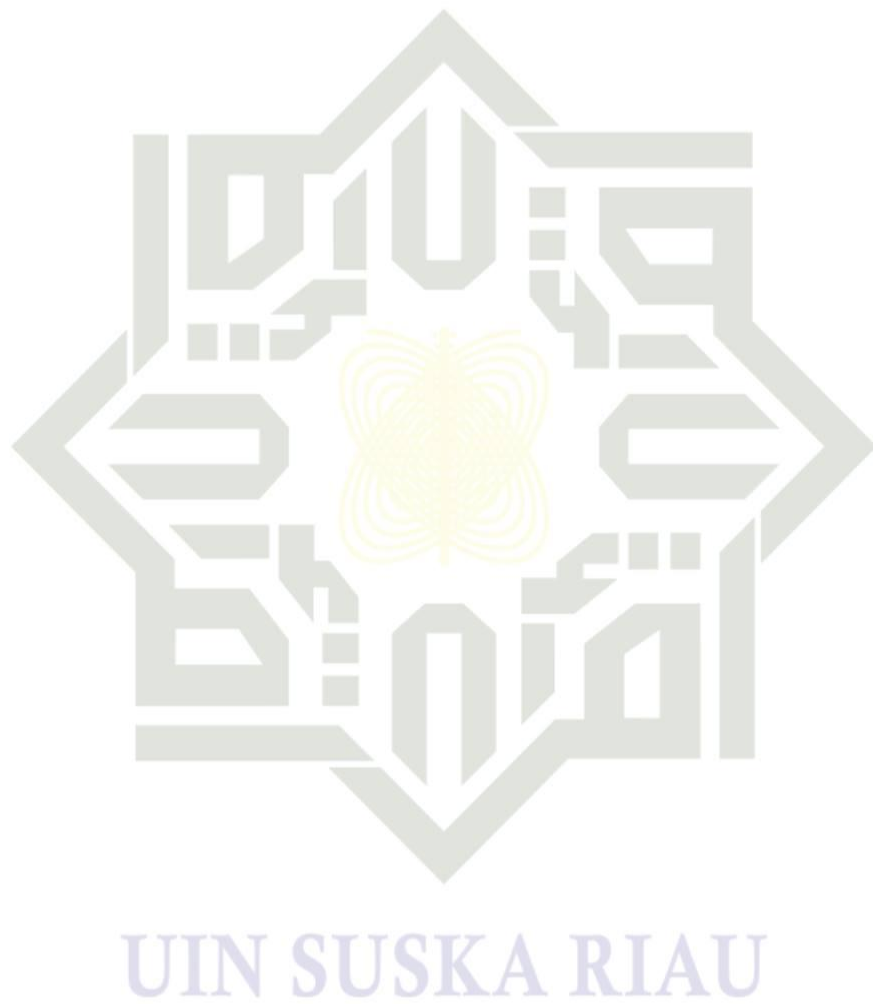
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	
Kabupaten Kampar Periode 2016 – 2021 .....	80





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengambilan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	A	ط	Tha	Th
ب	Ba	B	ظ	Zha	Zh
ت	Ta	T	ع	‘ain	‘
ث	Tsa	Ts	غ	Ghain	Gh
ج	Jim	J	ف	Fa	F
ح	Ha	H	ق	Qaf	Q
خ	Kha	Kh	ك	Kaf	K
د	Dal	D	ل	Lam	L
ذ	Dzal	Dz	م	Mim	M
ر	Ra	R	ن	Nun	N
ز	Zai	Z	و	Waw	W
س	Sin	S	ه	Ha	H
ش	Syin	Sy	ء	Hamzah	‘
ص	Shad	Sh	ي	Ya	Y
ض	Dhad	Dh			

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang= Û misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qaulun

Diftong (ay) = اي misalnya خري menjadi khayrun

## C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditranliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

*al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiridari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Misalnya يف رحمت هلا menjadi *fi rahmatillâh*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

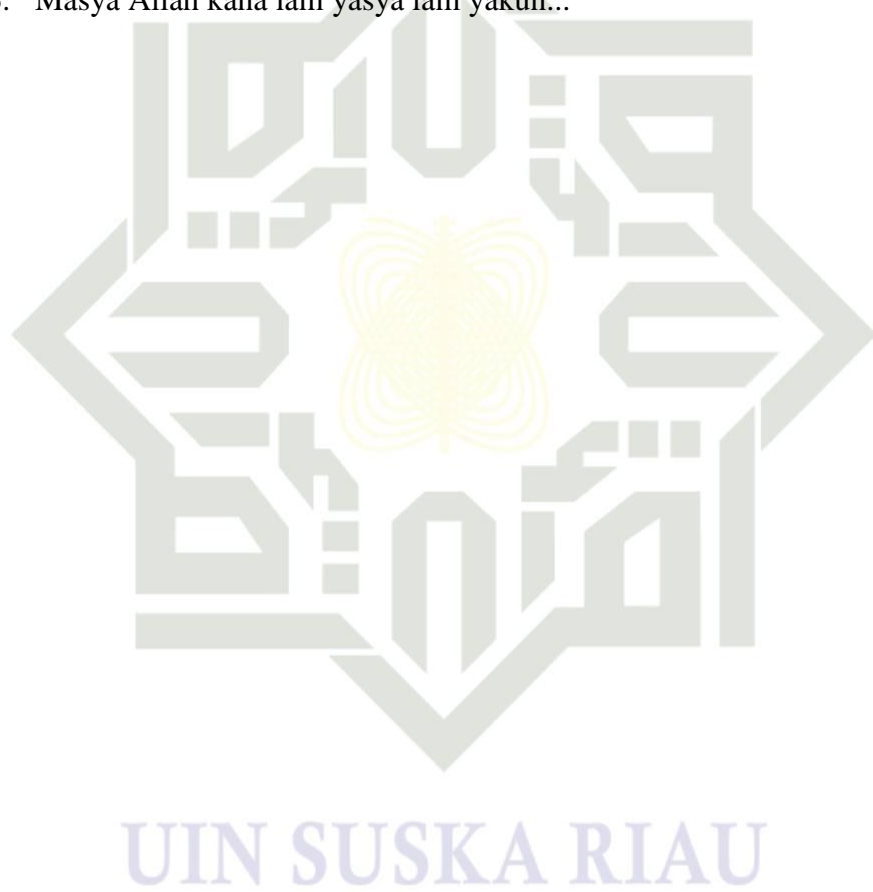
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Kata Sandang dan Lafdz Al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali

terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâry mengatakan...
2. Al-Bukhâry dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allâh kâna lam yasyâ lam yakun...





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Mifta Hasda (2021) : Peranan Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif (Studi Pada BMT Marwah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar)

Sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Meningkatkan akses pada lembaga keuangan bagi masyarakat diharuskan agar tercapai pertumbuhan ekonomi dan stabilnya sistem keuangan. Dengan mengubah sistem keuangan yang eksklusif menjadi sistem keuangan yang inklusif maka diharapkan masyarakat pada kelompok *in the bottom of pyramid* yang sebagian besar tidak terjangkau akses keuangan formal dapat menggunakan dan memanfaatkan layanan jasa keuangan formal. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dan Lembaga Zakat merupakan lembaga keuangan syariah yang bersifat inklusif. Di Kabupaten Kampar BMT Marwah dan BAZNAS merupakan lembaga keuangan syariah yang langsung menyentuh masyarakat kalangan bawah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya BMT Marwah dan BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan keuangan inklusif serta apa saja hambatan dan solusi dalam mengimplementasikan keuangan inklusif.

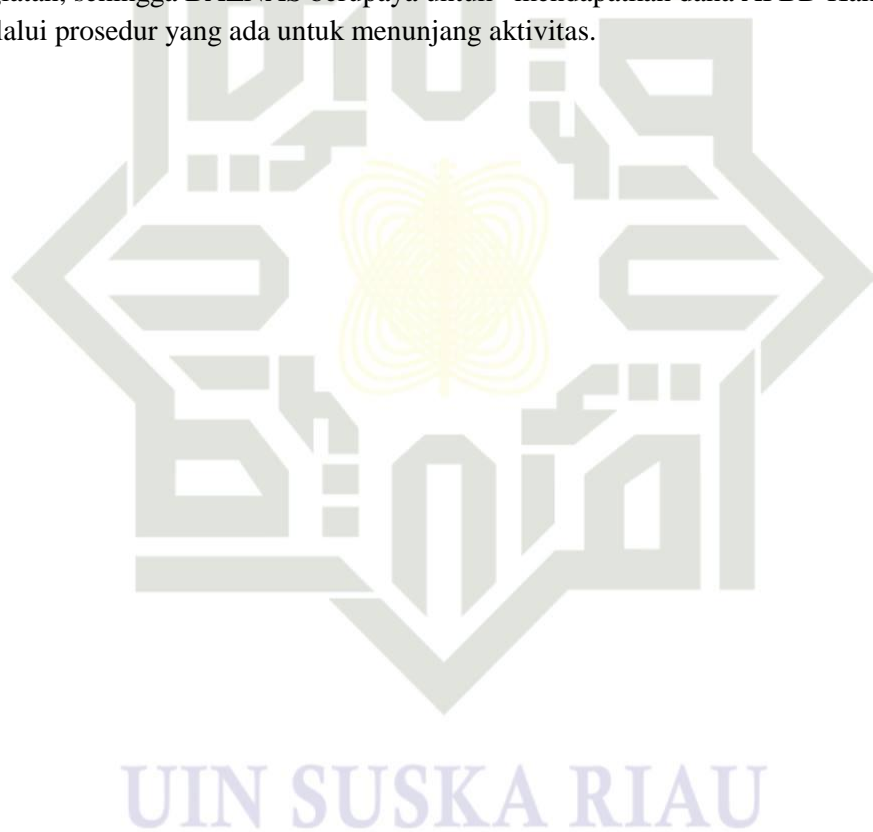
Penelitian ini dilakukan di BMT Marwah yang beralamat di Jalan Raya Bangkinang – Pekanbaru KM 34, pertokoan terminal pasar Danau Bingkuang dan BAZNAS Kabupaten Kampar di Jalan DI Panjaitan Komplek Markaz Islamy. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Populasi penelitian ini adalah karyawan BMT Marwah dan pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar. Key informan penelitian adalah kepala kantor cabang utama BMT Marwah dan Wakil ketua bidang pengumpulan dan distribusi, pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kampar. Metode pengumpulan data dengan observasi, perpustakaan, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dari penelitian ini adalah BMT Marwah berupaya memberikan produk – produk simpanan dan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selain itu produk jasa keuangan yang diberikan memiliki persyaratan yang mudah dan kejelasan dalam setiap aktivitas keuangan. Memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan adanya sistem jempot bola memberikan kemudahan bagi nasabah dan calon nasabah jika ingin melakukan transaksi keuangan. BAZNAS Kabupaten Kampar berupaya untuk meningkatkan jumlah muzaki yang berzakat di BAZNAS dengan cara sosialisasi, pembentukan UPZ, advokasi dan pelayanan zakat. Kemudian BAZNAS mendistribusikan zakat dengan berbagai program untuk meningkatkan taraf hidup mustahik sebagai penerima zakat dengan berbagai program yang ada. Adapun hambatan BMT dalam mengimplementasikan keuangan inklusif adalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah pembiayaan khususnya mudharabah yang sulit untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaan, pandangan sebagian masyarakat yang masih menganggap BMT sama saja dengan lembaga keuangan konvensional dan ada rentenir yang ada disekitar masyarakat seakan – akan memberikan pembiayaan yang lebih mudah. Oleh sebab itu BMT berupaya untuk memberikan produk pembiayaan yang sesuai untuk masyarakat, meningkatkan sosialisasi tentang produk – produk, hak dan kewajiban dari BMT maupun nasabah, mulai mengenalkan aplikasi payBMT untuk kemudahan transaksi selain sistem jemput bola. BAZNAS belum menerapkan zakat melalui layanan keuangan tanpa kantor karena belum menerima instruksi dari pusat. Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan memiliki kendala terbatasnya sumberdaya manusia yang cakap dalam melaksanakan tugas, membutuhkan kendaraan operasional untuk kelancaran kegiatan, sehingga BAZNAS berupaya untuk mendapatkan dana APBD Kampar melalui prosedur yang ada untuk menunjang aktivitas.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **Mifta Hasda (2021): The Role of Islamic Financial Institutions in Implementing Inclusive Finance (A Study on BMT Marwah and the National Zakat Agency (BAZNAS) of Kampar Regency)**

The financial system plays a very important role in the growth and stability of a country's economy. Increasing access to financial institutions for the public is required in order to achieve economic growth and stable financial system. By changing exclusive financial system into inclusive, it is expected that people in the bottom of the pyramid group, most of them are not reached by formal financial access, can use and take advantage of formal financial services. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) and Zakat Institution are inclusive Islamic financial institutions. In Kampar Regency, BMT Marwah and BAZNAS are sharia financial institutions that directly touch the low-class society. The formulations of the problems of this research are the efforts of BMT Marwah and BAZNAS of Kampar Regency in implementing inclusive finance, the obstacles and solutions in implementing inclusive finance. This research was conducted at BMT Marwah located on Bangkinang - Pekanbaru main street KM 34, the shops at Danau Bingkuang market terminal, and BAZNAS of Kampar Regency on DI Panjaitan street, Markaz Islamy complex. It was a field research. The employees of BMT Marwah and administrators of BAZNAS of Kampar Regency were the population of this research. The key informants of this research were the head of the main branch office of BMT Marwah and the deputy head of the collection and distribution, empowerment of BAZNAS Kampar Regency. The methods of collecting the data were observation, library, interview, and documentation. After the data were collected, the data were analyzed by using qualitative analysis with the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The research findings showed that BMT Marwah strived to provide savings and financing products in accordance with the needs of the community, besides that the financial service products provided had easy requirements and clarity in every financial activity. Providing direct socialization to the public and the existence of a ball pick-up system making it easy for customers and potential customers to conduct financial transactions. BAZNAS Kampar Regency strived to increase the number of *muzaki* who tithed at BAZNAS by means of socialization, the formation of UPZ, advocacy and zakat services. Then, BAZNAS distributed zakat with various programs to improve the living standard of *mustahik* as zakat recipients with various existing programs. The obstacles encountered by BMT in implementing inclusive finance were the financing customers, especially mudharabah, who find it difficult to complete financing obligations, the view of some the community that still considered BMT to be the same as conventional financial institutions and the moneylenders around the community as if they would provide easier financing. Therefore, BMT strived to provide financing products that were suitable for the community, increase socialization about products, rights, and obligations of BMT and customers, begin to introduce payBMT application to ease transactions besides the ball pick-up system.



BAZNAS did not yet implement zakat through officeless financial services because the instruction from the center was not yet received. In carrying out activities in the field, there were obstacles: limited human resources who were capable of carrying out the tasks, requiring operational vehicles for smooth activities, so BAZNAS strived to obtain Kampar Regional Revenues and Expenditures Budget (APBD) funds through existing procedures to support activities.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ملخص

مفتاح حاسدا، (٢٠٢١): دور المؤسسات المالية الشرعية في تطبيق التمويل الشامل (دراسة في بيت المال والتمويل مروءة والوكالة الوطنية للزكاة لمنطقة كمفر)

النظام المالي له دور مهم للغاية في نمو اقتصاد الدولة واستقراره فزيادة وصول الجمهور إلى المؤسسات المالية أمر مطلوب من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والنظام المالي المستقر. ومن خلال تغيير النظام المالي الحصري إلى النظام المالي الشامل من المأمول أن يتمكن الأشخاص في المجموعة الموجودة في أسفل الهرم والذين لا يغطيهم الوصول المالي الرسمي من استخدام الخدمات المالية الرسمية والاستفادة منها. بيت المال والتمويل والوكالة الوطنية للزكاة من المؤسسات المالية الإسلامية الشاملة. وفي منطقة كمفر يعد بيت المال والتمويل مروءة والوكالة الوطنية للزكاة من المؤسسات مالية شرعية تمس مجتمع الطبقة الدنيا بشكل مباشر. وأما السؤال المطروح في هذا البحث فما هي جهود بيت المال والتمويل مروءة والوكالة الوطنية للزكاة لمنطقة كمفر لتطبيق التمويل الشامل، وما هي العوائق والحلول في هذا التطبيق.

تم إجراء هذا البحث في بيت المال والتمويل مروءة الذي يقع في شارع بنجكينانج – بكنبارو ك.م ٣٤. وتحديدا في المحلات التجارية لمحطة سوق داناو بينجكوانج. وفي الوكالة الوطنية للزكاة لمنطقة كمفر التي تقع في شارع د. إ. فنجايتان وتحديدا في مجمع المركز الإسلامي وهذا البحث هو بحث ميداني. ومجمعه موظفو بيت المال والتمويل مروءة ولجنة تنظيم الوكالة الوطنية للزكاة لمنطقة كمفر. والمخبر الأساسي مدير إدارة فرع أساسي لبيت المال والتمويل مروءة ونائب رئيس مجال الجمع والتوزيع والاستخدام للوكالة الوطنية للزكاة لمنطقة كمفر. وأساليب مستخدمة لجمع البيانات هي ملاحظة ومكتبة ومقابلة وتوثيق. والبيانات التي تم جمعها حلت بتحليل كافي بمراحل تخفيض البيانات وعرض البيانات والاستنتاج/الإثبات.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ونتيجة البحث هي أن بيت المال والتمويل مروة يسعى لتوفير منتجات الادخار والتمويل التي تتناسب مع احتياجات المجتمع، فضلا عن ذلك تكون منتجات الخدمات المالية المقدمة لها متطلبات سهلة ووضوح في كل نشاط مالي. ويوفر التنشئة الاجتماعية المباشرة للجمهور ووجود نظام التقاط الكرة الذي يسهل على العملاء وعلى من سيكون عاملا إن أرادوا القيام بالمعاملات المالية. الوكالة الوطنية للزكاة لمنطقة كمفر يسعى لزيادة عدد المزمكين بطريقة التنشئة الاجتماعية وتشكيل وحدة تحصيل الزكاة ودعوة الزكاة وخدمات الزكاة. ثم تقوم الوكالة بتوزيع الزكاة ببرامج مختلفة لتحسين المستوى المعيشي للمستحقين كالمتلقيين للزكاة مع عدة البرامج القائمة تتمثل العوائق التي يواجهها بيت التمويل والتمويل مروة في تنفيذ التمويل الشامل في طبيعة عملاء تمويل المضاربة الذين يجدون صعوبة في استكمال التزاماتهم التمويلية ، ورأي بعض الأشخاص الذين ما زالوا يفكرون في تنفيذ التمويل الشامل. التمويل مشابه للمؤسسات المالية التقليدية، وهناك مقرضون حول المجتمع الذين كما لو كانوا يوافقون تمويل سهل. لذلك يسعى بيت المال والتمويل مروة جاهدا لتوفير منتجات التمويل المناسبة للمجتمع، وزيادة التواصل الاجتماعي حول المنتجات، وحقوق والتزامات بيت المال والعملاء، والبدء في تقديم تطبيق *payBMT* للمعاملات السهلة بخلافه نظام التقاط الكرة. الوكالة الوطنية للزكاة لم تنفذ الزكاة من خلال الخدمات المالية غير الرسمية لأنها لم تتلق تعليمات من المركز. عند تطبيق الأنشطة في هذا المجال، هناك قيود على الموارد البشرية المحدودة القدرة على تطبيق المهام، والتي تتطلب مركبات تشغيلية لأنشطة سلسلة، لذلك تسعى هذه الوكالة للحصول على أموال ميزانية الإيرادات والنفقات الإقليمية لمنطقة كمفر من خلال الإجراءات الحالية لدعم الأنشطة.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kemiskinan dan tidak merata distribusi pendapatan merupakan permasalahan yang dihadapi banyak Negara, termasuk Indonesia. Pembangunan terus dilakukan pemerintah sebagai upaya agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Akan tetapi hingga saat ini, pembangunan tidak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat menengah ke atas mendapat banyak keuntungan dari pembangunan, sedangkan masyarakat dari kalangan bawah belum bisa memanfaatkannya.

Kesenjangan merupakan salah satu persoalan dalam paradigma pembangunan ekonomi di berbagai Negara berkembang. Munculnya kesenjangan ekonomi akan menimbulkan banyak masalah lain yang bermunculan, seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan menurun, kemampuan daya beli masyarakat yang menurun.<sup>1</sup>

Kesenjangan yang terjadi di tengah – tengah masyarakat, memaksa masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk meminjam baik untuk sekedar mencukupi kebutuhan ataupun untuk mengembangkan usaha. Dalam keadaan seperti ini, pinjaman yang dibutuhkan oleh masyarakat pinjaman yang cepat, mudah dan murah. Tidak peduli apakah itu dari

<sup>1</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 10.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga keuangan yang formal ataupun pinjaman kepada individu bahkan rentenir. Pada akhirnya mereka terjebak kedalam keadaan yang semakin buruk.

Selain masyarakat yang kekurangan, sebagian masyarakat yang memiliki kelebihan tetapi mereka tidak terjangkau akses keuangan resmi untuk menyimpan uang mereka sehingga dapat dimanfaatkan dan lebih produktif. Tidak hanya habis untuk konsumsi pribadi. Dengan menyimpan di lembaga keuangan secara tidak langsung masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat tambahan pendapatan dari bagi hasil dengan lembaga keuangan dan masyarakat yang kekurangan bisa mendapatkan pembiayaan untuk modal usaha.

Oleh sebab itu dibutuhkan peran pemerintah untuk membuat suatu inovasi dalam sistem keuangan yang dulu bersifat eksklusif menjadi inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses permodalan (*deficit*) dan menggunakan jasa keuangan berupa tabungan (*surplus*).

Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem keuangan memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sistem keuangan memengaruhi tingkat tabungan, investasi, inovasi, teknologi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di suatu Negara, bahkan perkembangan sistem keuangan mampu memprediksi perkembangan ekonomi ke depan. Umumnya Negara – Negara yang menjadi pemimpin perekonomian dunia adalah Negara – Negara yang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil mengembangkan sistem keuangan yang relative lebih maju dan berfungsi dengan baik.<sup>2</sup>

Industri keuangan memainkan peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan pencapaian stabilitas sistem keuangan melalui pelaksanaan fungsi intermediasi. Perekonomian yang tumbuh berkelanjutan membutuhkan sistem keuangan yang mampu menyalurkan dana secara efisien dari masyarakat penabung (*surplus unit*) ke masyarakat yang memiliki peluang – peluang investasi produktif (*deficit unit*). Peran vital sistem keuangan tersebut muncul karena para pelaku ekonomi tersebut selalu dihadapkan kepada tingginya biaya informasi dan biaya transaksi keuangan. Meunculnya dua jenis biaya tersebut mengakibatkan transaksi langsung antara pihak pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana tidak dapat berjalan secara optimal.<sup>3</sup>

Perekonomian Negara – Negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau *Organisation Of Islamic Cooperation* (OIC) masih berada pada kondisi perekonomian yang tertinggal dibandingkan Negara – Negara lain. Tingkat kemiskinan dan pengangguran menunjukkan angka yang masih tergolong tinggi di antara Negara - Negara di dunia. Padahal

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 16.

<sup>3</sup> Kusumaningkti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, (Depok : Rajawali Press, 2018), h. 23.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi keseluruhan Negara – Negara anggota OKI merupakan 22,8 persen dari total penduduk dunia.<sup>4</sup>

Kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang masih lemah dan ditambah dengan kebijakan pemerintah yang umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek.<sup>5</sup> Inklusi keuangan merupakan suatu program keuangan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan keuangan yang inklusif masyarakat yang berada pada kelompok *in the bottom of pyramid* yang umumnya tidak terjangkau akses keuangan formal pada akhirnya dapat menggunakan dan memanfaatkan layanan jasa keuangan formal.

Survey bank dunia pada tahun 2010 menunjukkan hanya 49% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Hal serupa ditemukan bank Indonesia dalam survey neraca rumah tangga tahun 2011 yang menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48 %. Rendahnya akses ini disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional bank rumit, kurangnya edukasi keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang tinggi serta jauhnya lokasi bank dari tempat tinggal mereka. Untuk itu, muncul pemikiran untuk menerapkan strategi keuangan inklusif untuk mendorong kegiatan ekonomi kelompok masyarakat yang belum menikmati layanan

<sup>4</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), h.2.

<sup>5</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 78.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan, sehingga mendorong pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.<sup>6</sup> Proses eksklusif keuangan membuat masyarakat miskin tidak dapat mengakses benefit dari sektor keuangan dan memberikan kerugian kepada masyarakat untuk mendapat akses terhadap sistem keuangan karena kurang akses, jaminan, riwayat kredit dan jaringan.<sup>7</sup>

Strategi nasional keuangan inklusif mendefinisikan keuangan inklusif sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Untuk menerapkan keuangan yang inklusif tidak hanya menjadi tugas dari Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga keuangan lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif diharapkan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

Indonesia merupakan Negara yang melaksanakan *dual system* dalam melaksanakan system keuangan, yaitu konvensional dan syariah. Dengan mayoritas jumlah penduduk beragama Islam memberikan

<sup>6</sup> Booklet Keuangan Inklusif, (Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM: Bank Indonesia, 2014), h. 4.

<sup>7</sup> Azwar Iskandar, *Index Of Syariah Financial Inclusion In Indonesia*, bulletin ekonomi moneter dan perbankan. Vol. 20, No 1, Juli 2017, h.103.

<sup>8</sup> Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), h. 11.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan yang luas bagi lembaga keuangan syariah untuk berkembang. Lembaga keuangan Syariah yang dalam kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip syariah berlandaskan nilai – nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Membuat kesepakatan bersama antara lembaga keuangan dan nasabah dalam pembagian hasil dan margin keuntungan mencerminkan nilai keadilan. Lembaga keuangan syariah berkontribusi dalam pengembangan ekonomi secara nasional mewujudkan nilai kemanfaatan. Memposisikan nasabah sebagai mitra untuk berbagi keuntungan dan resiko secara seimbang menunjukkan keseimbangan. prinsip Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* tidak membedakan golongan masyarakat baik dari agama, suku dan ras menunjukkan nilai universal dari lembaga keuangan syariah.<sup>9</sup>

Terdapat kesamaan antara keuangan inklusif dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan syariah yaitu mewujudkan keadilan. Artinya tidak membeda – bedakan. Sistem keuangan syariah merupakan system keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.<sup>10</sup>

Dalam kaitannya dengan penghimpunan dan penyaluran dana, bank sebagai suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi tersebut semakin giat meningkatkan peran dan fungsinya dalam

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2017), h, 33.

<sup>10</sup> Andi Soemtra, *op.cit*, h , 17.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghimpun dana dari masyarakat, pemerintah dan kalangan swasta untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Sejalan dengan makin berkembangnya perbankan umum secara nasional, ternyata perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah dalam satu dasawarsa belakangan ini juga mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, rekasadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan bahkan juga modal ventura syariah.<sup>11</sup>

Akan tetapi inklusi keuangan yang diterapkan perbankan menurut Rusli Abdullah, ekonom dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) hanya akan memberikan keuntungan bagi masyarakat di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh uang – uang yang ada di desa akan diserap di bank lalu disalurkan ke kota karena kebutuhan kredit di perkotaan lebih besar dari pada di desa.<sup>12</sup>

Di Indonesia, keberadaan BMT (*Baytul Maal Wat Tamwil*) dapat dianggap sebagai contoh inklusi keuangan syariah. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam membuka akses kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan. Demikian pula dengan keberadaan BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang menyediakan sumber keuangan bagi

<sup>11</sup> Dicki Hartanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Konsep Umum dan Syariah*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012), h. 3.

<sup>12</sup> Wan Ulfa Nur Zuhra, *Bumerang Inklusi Keuangan*, <https://tirto.id/bumerang-inklusi-keuangan-ck1g>, (diakses tanggal 4 november 2019).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok miskin pada lapisan terbawah masyarakat yang selama ini belum terakses oleh lembaga keuangan yang ada.<sup>13</sup>

Dengan berdirinya BMT akan memberikan kemudahan pelayanan jasa semi perbankan, terutama bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian pedesaan. Dengan demikian keberadaan BMT diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga keuangan informal yang bunganya relative terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi pengusaha kecil.<sup>14</sup>

Secara paraktik kelembagaan mikro ekonomi (keuangan) Islam modern itu bukan saja *feasible* (layak berdiri dan beroperasi), melainkan membuat Indonesia dijuluki *the silent giant from the east* karena sejarah pertumbuhan dan perkembangan bukan bersifat *top down* seperti di Malaysia, tetapi *bottom top*.<sup>15</sup>

Selain lembaga keuangan mikro syariah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu menerapkan zakat inklusi. Zakat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta telah sampai *nisab* dan *haul*

<sup>13</sup> Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), h. 229.

<sup>14</sup> Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014), h. 142.

<sup>15</sup> Sukron Kamil, *Ekonomi Islam Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 184.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(muzakki) untuk di distribusikan kepada yang berhak menerima (mustahiq) merupakan sumber dana yang cukup besar yang dimiliki Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Potensi yang besar diharapkan mampu diberdayakan dengan baik melalui inklusi zakat.

Allah menganugraahkan umat Islam kelebihan yang perlu dikembangkan secara maksimal. Umat Islam memiliki potensi sumber daya manusia yang banyak, dari para intelektual dan ulama serta memiliki ekonomi yang berlimpah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka seluruh potensi perlu dikembangkan secara serius diiringi dengan potensi akidah Islamiah (tauhid) yang benar. Kemudian untuk mengurangi kesulitan ekonomi dan kemungkaran diperlukan kemandirian, diperlukannya meningkatnya semangat beragama dan ukhuwah Islamiah di tengah – tengah umat untuk dilakukan secara bersamaan. Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak serta sedekah merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang perlu dilakukan secara serius.<sup>16</sup>

Zakat bukanlah semata mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). zakat memiliki posisi dan kedudukan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan ekonomi

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 262





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, sehingga diperlukannya pengelolaan dalam pengumpulan dan penyaluran dilakukan secara amanah, transparan dan profesional.<sup>17</sup>

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dengan jumlah penduduk 812.702 jiwa<sup>18</sup> dan sebagian besar penduduk beragama Islam. Adanya pelarangan transaksi yang mengandung unsur riba dalam Islam tentunya membuat masyarakat beragama Islam memiliki kebutuhan untuk bisa mengakses dan memanfaatkan jasa keuangan syariah. BMT Marwah salah satu lembaga mikro syariah yang berada di Kabupaten Kampar dan BAZNAS Kabupaten Kampar sebagai lembaga pengelola zakat, yang diharapkan mampu menjadi lembaga yang dapat menyentuh masyarakat yang belum tersentuh akses lembaga perbankan dalam memunihi kebutuhannya untuk memanfaatkan jasa lembaga keuangan.

Menjadi lembaga keuangan syariah yang inklusif sebuah keharusannya bagi BMT Marwah. Memiliki 4 kantor cabang yang tersebar di Kabupaten Kampar dan BAZNAS Kabupaten Kampar yang setiap tahunnya jumlah penerimaan zakat mengalami peningkatan. Artinya jumlah masyarakat yang mendapat akses keuangan dari lembaga keuangan syariah ini akan meningkat. Akan tetapi masih ada masyarakat sekitar pedagang kecil memilih untuk mendapatkan tambahan modal atau menyimpan kelebihan dana secara individu ataupun lembaga keuangan konvensional. Ditambah lagi dengan banyaknya penawaran pinjaman dana

<sup>17</sup> Sukron Kamil, *Op.cit*, h. 274

<sup>18</sup> BPS Kabupaten Kampar, <https://kamparkab.bps.go.id/indicator/12/40/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>, (diakses pada tanggal 8 Juli 2019)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

depan cepat dan mudah yang ditawarkan melalui selebaran ataupun pesan singkat langsung ke handphone.

Begitu juga dengan zakat dimana sebagian besar masyarakat memilih untuk berzakat secara langsung, sehingga zakat hanya bersifat konsumtif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kebiasaan dari muzakki, kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, kurang percaya terhadap lembaga zakat dan kantor lembaga zakat yang jauh. Potensi penerimaan yang dana zakat yang cukup besar seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana bagi masyarakat yang belum mampu mengakses lembaga keuangan formal sehingga terwujudnya pemerataan distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Melihat fenomena tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif (Studi Pada BMT Marwah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZANAS) Kabupaten Kampar).

## B. Permasalahan

### a. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala – gejala yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian dalam bentuk beberapa pernyataan sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Survey bank dunia pada tahun 2010 menunjukkan hanya 49% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal.
2. Hasil survey nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan ojk tahun 2016, literasi dan inklusi keuangan syariah jauh dibawah tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional.
3. Lembaga keuangan yang eksklusif membuat masyarakat miskin tidak mampu mengakses dan mendapat keuntungan karena kurangnya akses, jaminan dan jaringan.
4. Bank hanya akan menyerap uang yang ada di desa lalu disalurkan ke perkotaan karena permintaan akan kredit di perkotaan lebih besar.
5. Mayoritas masyarakat kabupaten Kampar beragama Islam maka kebutuhan menggunakan jasa keuangan syariah sangat tinggi, akan tetapi sebagian besar belum menggunakan jasa keuangan syariah.
6. BMT Marwah menjadi contoh inklusi keuangan syariah, akan tetapi masyarakat sekitar belum bisa mengakses jasa keuangan baik tabungan ataupun pembiayaan.
7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga keuangan syariah yang menjadi contoh inklusi keuangan selain dari BMT, seharusnya BAZNAS dapat meningkatkan pengunmpulan zakat dan menjadi sumber keuangan bagi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat miskin (mustahik) yang belum tersentuh lembaga keuangan.

b. Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi masalah penelitian pada upaya lembaga keuangan mikro syariah di Kabupaten Kampar yaitu BMT Marwah dan BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan keuangan inklusif.

c. Rumusan masalah

- a) Bagaimana upaya BMT Marwah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif ?
- b) Bagaimana upaya BAZNAS Kab. Kampar dalam mengimplementasikan keuangan inklusif ?
- c) Apa hambatan dan solusi BMT Marwah dan BAZNAS untuk mengimplementasikan keuangan inklusif?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis upaya BMT Marwah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif.
- b) Untuk menganalisis upaya BAZNAS Kab. Kampar dalam mengimplementasikan keuangan inklusif.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Untuk menganalisis hambatan dan solusi BMT Marwah dan BAZNAS untuk mengimplementasikan keuangan inklusif.

**D. Kegunaan Penelitian****a. Kegunaan akademik**

Secara akademik penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang di dapatkan di lapangan tentang upaya BMT Marwah dan BAZNAS Kab. Kampar dalam mengimplementasikan keuangan inklusif.
2. Sebagai bahan kajian bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

**b. Kegunaan secara praktis**

Secara praktis penelitian ini bagi pihak yang terkait dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan perencanaan dan rancangan program dalam upaya mewujudkan keuangan inklusif di Kabupaten Kampar.

**E. Sistematika Penulisan**

Pokok bahasan dari seluruh rangkaian penulisan tesis ini dibahas dalam lima bab.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan yang dibagi sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian

## **BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Bab ini akan menguraikan tentang pengertian lembaga keuangan syariah, pengertian BMT, peranan BMT, Lembaga Amil Zakat, pengertian keuangan inklusif, kelompok sasaran keuangan inklusif, indicator keuangan inklusif, inklusi zakat dan penelitian terdahulu.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

## **BAB IV : PENYAJIAN HASIL PENELITIAN**

Pada bagian ini menyajikan hasil penelitian berupa analisis data yang telah didapatkan.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## LANDASAN TEORETIS

## A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan (*finansial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan/atau jasa – jasa keuangan lainnya.

<sup>19</sup>. Lembaga keuangan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. <sup>20</sup>

Lembaga keuangan dapat dipahami sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Menurut SK Menkeu RI No 792 Tahun 1990 Lembaga keuangan menurut SK Menkeu RI No 792 Tahun 1990 adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

<sup>19</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 1.

<sup>20</sup> Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok : Rajawali Press, 2017), h. 127.

<sup>21</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana 2017), h. 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lembaga keuangan menurut Dahlan Siamatadalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan asset nonfinansial atau asset rill. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat - surat berharga. Disamping itu lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan system pembayaran dan mekanisme transfer dana.
3. Lembaga keuangan didefinisikan oleh Syarif Wijaya dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Lembaga keuangan biasanya memberikan pembiayaan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat – surat berharga. Disamping itu lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis tabungan, asuransi, program pensiun dan penyediaan sistem pembayaran. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa – jasa keuangan.
4. Lembaga keuangan didefinisikan oleh Kasmir adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua – duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau menghimpun dan menyalurkan dana.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum lembaga keuangan ada dua jenis. Dimana lembaga keuangan tersebut memiliki fungsi dan kelembagaan yang berbeda, serta memiliki fungsi dan tujuan masing – masing.<sup>22</sup>

1. Lembaga keuangan Bank

Definisi bank menurut UU No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Lembaga keuangan bukan bank

Lembaga keuangan bukan bank berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana dari masyarakat ke masyarakat, maksudnya adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan modal serta membantu permodalan perusahaan – perusahaan. Adapun lembaga keuangan bukan bank antara lain :

1. Asuransi
2. Modal ventura
3. Pegadaian
4. Leasing
5. BMT
6. Koperasi
7. Pasar modal

<sup>22</sup> Dicki Hartanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Konsep Umum dan Syariah*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012), h. 13



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pasar uang
9. Kartu plastik
10. Anjak piutang

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau insitusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset – aset keuangan (*financial assets*) maupun nonfinansial aset atau aset rill berlandaskan konsep syariah. Menurut undang – undang tentang Perbankan Syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan lembaga atau badan usaha yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dinyatakan pula bahwa lembaga keuangan syariah adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama dalam membiayai investasi pembangunan.<sup>23</sup>

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depositori syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut dengan lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah nondepository (*nondepository financial institution syariah*). Lembaga keuangan syariah nondepository dibagi menjadi tiga bagian utama.

<sup>23</sup> Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*,( Jakarta : Kencana , 2012),h.293.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bersifat kontraktual (*contractual institution*), yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabaung terhadap resiko ketidakpastian. Misalnya, perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun syariah.
2. Lembaga keuangan investasi syariah (*Syariah investment institution*), yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatan utamanya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah, salah satunya adalah rekasadana syariah, sukuk, obligasi.
3. Lembaga yang tidak termasuk kelompok kontraktual dan investasi syariah, yaitu BMT, unit simpan pinjam syariah (USPS), koperasi pesantren (KOPONTREN), perusahaan modal ventura syariah dan perusahaan pembiayaan syariah (*syariah finance company*).<sup>24</sup>

### B. BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*)

#### a. Pengertian BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) dan Sumber Hukum

Kata *baitul mal wat tamwil* adalah penggabungan dari kata *baitul mal* dan kata *baitut tamwil*. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dananya diperoleh dari ZISWa (zakat, infak, sedekah dan Wakaf) atau sumber lain yang halal seperti hibah. Selanjutnya, dana tersebut disalurkan kepada mustahiq (yang berhak menerima). Dalam hal ini baitul mal hampir sama dengan LAZIS (lembaga amil zakat, infak dan sedekah).

<sup>24</sup> *Ibid*, h 294.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

BMT merupakan lembaga keuangan Islam yang berbeda dengan bank. BMT memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil, seperti kepada pedagang kecil yang kurang begitu menarik bagi bank. M. Amin Azis sebagai pelopor BMT di Indonesia menyebutkan padanan kata Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam bahasa Arab dengan Balai-usaha Mandiri Terpadu (BMT) dalam bahasa Indonesia. BMT adalah lembaga ekonomi rakyat yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat jelata atau akar rumput yang melembaga menjadi milik masyarakat.<sup>25</sup> BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan, BMT mengelola dana Maal.<sup>26</sup>

Koperasi jasa keuangan merupakan koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian dana dari para anggotanya kemudian dana tersebut disalurkan kembali untuk semua para anggota koperasi dan masyarakat umumnya dengan prinsip syariah. Artinya para anggota koperasi mempunyai simpanan uang untuk sementara waktu untuk

<sup>25</sup> Sukron Kamil, *Ekonomi Islam Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016), h. 199.

<sup>26</sup> Dicki Hartono, *Op., Cit*, h. 7.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum digunakan. Kemudian oleh pengurus koperasi uang tersebut dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang membutuhkan, termasuk kepada masyarakat umum yang membutuhkan jika memungkinkan.<sup>27</sup>

Baitul mal wa tamwil (BMT) dapat didefinisikan sebagai sebuah balai usaha mandiri terpadu yang mana dalam kegiatan usahanya bait al mal wa at-tamwil dapat mendorong kegiatan menabung dan memberikan pembiayaan untuk menunjang kegiatan ekonomi para pengusaha kecil-bawah. Kemudian BMT bisa menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan peraturan yang ada dan amanah.<sup>28</sup>

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang secara legal formal berbadan hukum koperasi. Sistem bagi hasil merupakan sistem operasional yang di adaptasi BMT dari sistem perbankan.<sup>29</sup> BMT dikategorikan dengan koperasi syariah, merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, BMT dapat juga disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau koperasi.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Muhammad sholahuddin, lembaga keuangan dan ekonomi islam, (Yogyakarta : penerbit ombak, 2014), h. 5.

<sup>28</sup> Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta : Amzah, 2016), h 35

<sup>29</sup> *Ibid*, h.36.

<sup>30</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2013), h. 26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keunggulan koperasi dalam penyediaan layanan keuangan mikro cukup banyak, yaitu :

1. Koperasi memiliki jangkauan layanan yang luas hingga ke wilayah yang tidak terjangkau oleh bank dan lembaga keuangan lainnya.
2. Koperasi pada umumnya berada dekat dengan tempat tinggal atau tempat usaha anggota. Hal ini menyebabkan layanan koperasi menjadi lebih mudah dijangkau dan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang besar.
3. Banyak koperasi yang menyediakan layanan dengan system jemput bola.
4. Koperasi memiliki syarat mudah dan proses cepat dalam memberikan pinjaman sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat miskin yang unbankable.
5. Koperasi memiliki persyaratan agunan pinjaman yang lebih mudah dibandingkan dengan bank, yaitu menerima agunan seperti tanah tanpa sertifikat dan perlengkapan elektronik rumah tangga. Selain itu, koperasi juga dapat memberikan pinjaman tanpa agunan melalui skema kelompok dengan mekanisme tanggung renteng.<sup>31</sup>

Apabila koperasi dipahami secara bahasa, yaitu kerja sama atau usaha bersama maka koperasi sudah ada pada masa Nabi Muhammad

<sup>31</sup> Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), h.230



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW. Sebagaimana terlihat dalam beberapa hadis, Rasulullah dan para sahabatnya telah melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi baik dengan sesama umat Islam maupun dengan orang – orang non-Muslim. Nabi pernah bekerja sama dengan menyuruh Yahudi agar menggarap tanah di Khaybar dan memberikan upah dari sebagian hasil produksi tanah itu. Kerja sama ini termasuk dalam kategori penjualan jasa dan dewasa ini sudah ada koperasi yang khusus berkenaan dengan bidang jasa itu.<sup>32</sup> Dalam sebuah Hadis Riwayat ‘Abd. Allah ibn ‘Umar dijelaskan sebagai berikut :

2499 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ، أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا»<sup>33</sup>

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma’, dari Nafi’, Dari ‘Abd. Allah r.a katanya : Rasulullah SAW menyerahkan tanahnya di Kaybar kepada orang – orang Yahudi untuk dikerjakan dan ditanami tanaman dan mereka mendapatkan sebagian dari hasil tanah tersebut”.

BMT pada saat ini berada dibawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan

<sup>32</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta : Kencana, 2015), h. 248

<sup>33</sup> Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *al- Jami’ al- Musnad Imam al- Bukhari* (Daruu Fauqiq an- Najaah, 1422 H), Cet. 1, 3: 140.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah.<sup>34</sup>

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peranan besar menstimulasi bergeraknya sektor riil dan sektor moneter dikalangan pengusahaan kecil. Sinergi dua sektor ini membawa implementasi pada penerapan nilai keadilan. Nilai ini tidak akan membiarkan surplus ekonomi hanya untuk kelompok ekonomi kuat dengan mengorbankan kelompok rakyat kecil yang mayoritas.

Kehadiran lembaga keuangan mikro secara langsung mencerminkan implemetasi demokrasi ekonomi yang diamanatkan konstitusi Negara RI 1945. LKM membuka peluang partisipasi masyarakat miskin dalam proses produksi dan distribusi. Selain partisipasi masyarakat luas, LKM Syariah juga memiliki kekuatan dan tidak mengenal monopoli dan oligopoli yang melahirkan ketidakadilan ekonomi. Tingkat bunga yang tidak mendukung berkembangnya ekonomi mikro tidak dikenal Karena dianggap riba yang bertetangan dengan nilai kemanusiaan dan nilai agama.<sup>35</sup>

Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT sangat berperan penting dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang memang membutuhkan tata cara bermualah yang sesuai dengan prinsip

<sup>34</sup> Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*,(Jakarta : Kencana , 2012),h. 285.

<sup>35</sup> Muhammad , *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), h



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah. Keberadaan BMT diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga – lembaga keuangan informasi seperti rentenir yang bunganya relative terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi pengusaha kecil.<sup>36</sup>

**b. Peranan BMT**

Jika dilihat dalam kerangka ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan hal – hal berikut :

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkan usaha – usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.

<sup>36</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung Alfabeta, 2010),h. 121.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>37</sup>
9. Melepaskan ketergantungan kepada para rentenir, masyarakat yang masih tergantung dengan rentenir yang disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Adapun peranan dari BMT dalam tengah-tengah masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah
3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu'afa (miskin)
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ahsanul 'amala dan salam melalui *spiritual communication* dengan dzikir qalbiyah ilahiah.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2013), h. 38.

<sup>38</sup> Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta :Kencana, 2010), Ed 1, h. 364.

<sup>39</sup> <http://www.mozaikislam.com/189/sifat-peran-dan-fungsi-bmt.htm>, di akses pada tanggal 10 Juli 2019.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Pemasaran BMT (*Baitul mal wa tamwil*)

BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah haruslah memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaannya agar bis bertahan hidup. BMT merupakan salah satu media dakwah di bidang ekonomi agar masyarakat memahami kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur tatanan kehidupan. Keunikan BMT menyatukan unit bisnis dan unit social dalam satu wadah.<sup>40</sup>

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pengelola dalam memasarkan produk – produk BMT kepada masyarakat, antara lain:

#### 1. Meluruskan niat

Beberapa petunjuk praktis di bawah ini dapat dijadikan rujukan pengelola dalam upaya meluruskan niat yaitu “

- a) Luruskan niat dengan selalu menyebut nama Allah dalam rangka pemasaran produk BMT tidak untuk mengharap ridha-Nya.
- b) Luruskan niat dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan misi BMT.
- c) Luruskan niat dengan dilandasi keyakinan bahwa memasarkan produk BMT juga merupakan salah satu bagian penting dari serangkaian perjuangan menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi dan dakwah menuju jalan yang benar.

<sup>40</sup> Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*,( Jakarta : Amzah, 2016),h. 200

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Luruskan niat dengan menyatakan ikrar dalam hati hendak memasarkan produk BMT secara maksimal dan pantang menyerah dalam menghadapi segala tantangan karena pertolongan Allah akan datang.

## 2. Memperhatikan ulama

Hal penting yang perlu diperhatikan pengelola BMT dalam memasarkan produknya adalah mengunjungi ulama dengan menjelaskan bahwa pengelolaan BMT mengikuti prinsip – prinsip syariah. Mengajak mereka unjuk mengunjungi BMT dan bekerja sama dengan organisasi di bawah naungan ulama.

## 3. Memperluas jaringan kerja sama

Langkah berikutnya yang harus dilakukan dalam memasarkan produk adalah dengan memperluas jaringan kerja sama yang saling menguntungkan sepanjang tidak mengingkari prinsip – prinsip syariah. Kerja sama ini dilakukan agar BMT semakin kukuh di masyarakat.

## 4. Menjemput bola

Keaktifan pengelola dalam memasarkan produk merupakan komponen terpenting dalam menentukan tingkat keberhasilan BMT. Salah satu cara efektif yang dapat dilakukan untuk mencapai target pemasaran adalah dengan melakukan pendekatan jemput. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendatangi calon anggota. Petugas BMT dapat dengan leluasa



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan kepada calon anggota mengenai konsep keuangan syariah, system, dan prosedur operasional BMT.<sup>41</sup>

### C. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

#### a. Lembaga Amil Zakat di Indonesia dan Sumber Hukum

Secara sosial zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa kahawatir terhadap kelangsungan hidup mereka jalani. Hal ini terjadi karena adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan juga tradisi saling menolong.

Selain itu, secara ekonomi zakat juga berfungsi sebagai salah satu instrument untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin. Zakat juga dapat memengaruhi kemampuan sebuah Negara dalam menjalankan kelangsungan hidupnya. Dengan adanya berbagai implikasi sosial dan ekonomi di atas, maka zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kukuh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dua

<sup>41</sup> Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*,( Jakarta : Amzah, 2016),h. 200 - 202.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi terakhir ini sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup suatu Negara.<sup>42</sup>

Pengorganisasian atau stuktur organisasi zakat perlu dilakukan agar pelaksanaan zakat dapat dikoordinasikan dan dapat diarahkan, dimana subjek maupun objek daripada zakat lebih mantap untuk mengetahui proses pengelolaan zakat mulai dari awal hingga pada sasaran zakat tersebut. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian zakat, yakni :

1. Penanggungjawab tertinggi seyogyanya ditangani oleh pemerintah atau pejabat tinggi dalam strata pemerintahan setempat atau lingkungan tertentu. Namun demikian, unsur – unsur masyarakat islam diikutsertakan dan turut pula bertanggung jawab.
2. Pelaksananya adalah suatu lembaga tetap dengan pegawai yang bekerja penuh secara professional, dibiayai pada permulaan dengan subsidi pemerintah, kemudian secara berangsur – angsur oleh dana amal zakat sendiri.
3. Kebijaksanaan harus dirumuskan secara jelas dan dipergunakan sebagai dasar perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber dan sasaran pemanfaatannya untuk satu waktu tertentu.
4. Program pendayagunaan zakat harus terperinci supaya lebih efektif dan produktif lagi bagi pengembangan masyarakat.

<sup>42</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.304.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Usulan proyek penggunaan dana untuk melaksanakan program yang dilakukan oleh lembaga dan atau organisasi masyarakat harus didasarkan pada studi kelayakan.
6. Mekanisme pengawasan dilakukan atas dasar peraturan – peraturan, administrasi, baik ketata usahaan maupun pembukuan. Pada setiap semester atau akhir tahun dibuat laporan kinerja yang transparan.
7. Pengembangan dasar – dasar hukum tentang zakat, pemahaman tentang zakat, sumber zakat, masalah pengumpulan dan pendayagunaannya dilakukan melalui penelitian, baik secara teoritik (kepuustakaan) maupun empiris (lapangan).
8. Penyuluhan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif guna menarik simpatik masyarakat untuk menunaikan ibadah zakat yang dilakukan secara teratur dan terus menerus.<sup>43</sup>

Tanda – tanda positif dari geliat zakat di Indonesia juga menunjukkan tentang mulai signifikannya urusan zakat dalam tata kelola Negara kita. Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2001 melalui SK Presiden no. 8 tahun 2001 semakin menguatkan posisi zakat dalam lingkaran pengelolaan Negara. Dengan semakin luasnya lingkup persoalan zakat dan semakin besarnya pengaruh zakat, maka sudah seharusnya apabila kini zakat lebih dalam lagi ditempatkan ditata kelola Negara Indonesia. Pola penanganan zakat juga harus mulai diubah, jika sebelumnya hanya didekati dalam platform hukum – hukum agama,

<sup>43</sup> Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 418.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka kedepan harus didekati juga dalam instrument pengelolaan keuangan dan kebijakan ekonomi.<sup>44</sup>

Pada awal diwajibkan zakat pada masa Rasulullah SAW, pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang – orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat (*al – ashnaf al – samaniyah*).<sup>45</sup>

Sistem manajemen zakat pada zaman Rasulullah adalah dengan melakukan pembagian amil menjadi beberapa bagian, yaitu :

- 1) *Katabah* : petugas untuk mencatat para wajib zakat
- 2) *Hasabah* : petugas untuk menaksir, menghitung zakat
- 3) *Jubah* : petugas untuk menarik, mengambil zakat dari muzaki
- 4) *Kahazanah* : petugas untuk menghimpun dan memelihara harta zakat
- 5) *Qasamah* : petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Bambang Hermanto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h.

<sup>45</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), Cet. Ke 1, h. 248

<sup>46</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), cet. Ke – 3, h. 214.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam Q.S at- taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>47</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukan semata – mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan kepada mustahik, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang secara khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut degan amil zakat. Ami zakat inilah yang bertugas melakukan sosialisasi kepada msyarakat, melakukan penagihan, pengambilan dan mendistribusikan secara tepat dan benar.<sup>48</sup>

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>49</sup>

Pengelolaan zakat bertujuan :<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Tim Syaamil Al – Qur'an, *Syaamil Al – Qur'an Terjemahan* ,(Bandung : Syaamil Al – Quran, 2010), h. 196.

<sup>48</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*,(Jakarta : PT Rajagrafindo, 2006), h. 30

<sup>49</sup> Undang – Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (1)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Manajemen pengumpulan zakat adalah suatu rangkaian aktivitas pengumpulan yang dilaksanakan secara sistematis dengan efektif dan efisien. Dibentuknya unit pengumpulan dana zakat, infak dan sadaqah (ZIS) untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana di sebuah amil zakat.<sup>51</sup>

Aktivitas pengumpulan terdiri dari :

- a. Sosialisasi, yaitu menjelaskan ZIS kepada masyarakat yang berpotensi menjadi muzakki sehingga sadar akan kewajibannya dan akan menjalankannya.
- b. Promosi, yaitu menjelaskan tentang kelebihan amil zakat yang akan menerima dan menyalurkan ZIS.

Strategi pengumpulan terbagi tiga, yaitu :

- a. *Bellow the line*, yaitu aktivitas pengumpulan yang dilakukan secara langsung kepada calon pembayar ZIS di lokasi – lokasi yang dinilai strategis dan potensial, misalnya: membuka stan pameran, dan lain – lain.
- b. *Above the line*, yaitu aktivitas pengumpulan yang dilakukan dengan menggunakan media massa cetak maupun elektronik sebagai alat untuk

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>51</sup> Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2015), Cet. Ke-3, h. 334

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menarik minat calon pembayar ZIS menggunakan jasa amil zakat tersebut, misalnya: iklan di koran/majalah dan radio/TV.

- c. *Aliansi*, yaitu aktivitas pengumpulan yang dilakukan dengan cara aliansi/kerja sama dengan lembaga – lembaga lain.

Langkah – langkah pengumpulan :

- a. Riset, yaitu melakukan riset dan analisa terhadap potensi dan perilaku calon muzakki yang akan dijadikan target pengumpulan serta hal – hal lain yang dapat memengaruhi.
- b. Perencanaan, yaitu membuat perencanaan jenis layanan apa saja yang akan dilakukan guna mengumpulkan dana ZIS dari target pasar tersebut.
- c. Oraganizing, yaitu menempatkan SDM yang akan menjalankan pelayanan, jumlah dan kualifikasinya.
- d. Pelaksanaan, yaitu menjalankan layanan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- e. Monitoring dan pengawasan, yaitu melakukan monitoring dan pengawasan apakah layanan dapat berjalan dengan baik dan bagaimana hasilnya.

Jenis layanan :

- a. Outlet amil zakat dengan setor tunai, cek/bilyet giro, debt card, dan lain – lain.
- b. Via kantor muzakki dengan melakukan potong gaji.
- c. Via bank dengan setor tunai, pindah buku, transfer, dan lain – lain.
- d. Layanan jemput dana, layanan jemput ke lokasi (kantor/rumah) muzakki.

Laporan :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Laporan bagi lembaga yang mengelola dana publik adalah sesuatu yang wajib.
- b. Laporan tersebut harus dipublikasikan ke media massa atau dikirim kepada muzakki dan pihak – pihak yang berkepentingan.<sup>52</sup>

Pelembagaan zakat mungkin tidak secara langsung menjadi bagian dari sistem keuangan, tetapi ia mempunyai akibat langsung pada sistem keuangan itu.<sup>53</sup> Kepercayaan sangat diperlukan dalam membentuk lembaga zakat. Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu sebagai berikut.<sup>54</sup>

#### 1. Keterbukaan

Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu *trust building*. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

#### 2. Kompeten

Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.

<sup>52</sup> *Ibid*, h 335

<sup>53</sup> M. Fahim Khan, Suherman Rosyidi, *Easi – Esai Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014) Cet. ke – 1, h. 86

<sup>54</sup> Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), h. 380



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang bersifat merugikan yang lain. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain jujur adalah berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Dalam penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

### 4. Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada lingkungannya atau orang lain. Akuntabilitas sekiranya dapat diukur dengan pertanyaan - pertanyaan tentang seberapa besar motivasi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan pekerjaan dan seberapa besar usaha (daya pikir) untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

#### 6. *Sharing*

*Sharing* adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan sebuah masalah. *Sharing* merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan karena mempunyai manfaat nilai psikologis yakni membantu membangun hubungan yang lebih baik antara satu sama lain. Termasuk didalamnya *sharing* informasi, ketrampilan, pengalaman dan keahlian.

#### 7. Penghargaan.

Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai antara satu sama lain.

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, bertahun – bertahun mendambakan upaya pemberdayaan ekonomi umat yang lebih sistematis, transparan dan modern sesuai syariah Islam. Pada dasarnya pembayaran zakat sudah dilakukan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari – sehari sebagai bentuk redistribusi pendapatan dari yang kaya kepada yang miskin. Namun pelaksanaannya masih banyak dilakukan secara individual dan belum terprogram berdasarkan prinsip jamaah, kecuali beberapa institusi yang telah berhasil menyelenggarakannya secara profesional, walaupun sebenarnya masih belum dilakukan sesuai teladan Rasulullah SAW.

Pelaksanaan zakat secara individual dilakukan dengan tradisi yang telah berlaku turun menurun, tanpa pemahaman yang kaffah. Zakat ditunaikan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 2.5 % dari harta yang disimpan, sedangkan untuk hasil pertanian pemilik sawah memberikan 1/5nya sebagai kompensasi dari menuai padi.<sup>55</sup>

Pemerintah berhak untuk mengatur sistem zakat bagi rakyatnya, dan berkewajiban membagikan hak kepada rakyat yang membutuhkannya. Di Indonesia masalah zakat telah diatur dalam undang – undang zakat no. 38 tahun 1998 dan undang – undang no 23 tahun 2011.<sup>56</sup>

Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 lembaga yang bertugas mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional sedangkan Lembaga Amil zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan seperti ini dimaksudkan agar orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban dan fakir miskin tidak merasa berhutang budi pada orang kaya karena menerima pembagian zakat. Apabila zakat dipungut oleh negara, keuntungannya diantara lain adalah sebagai berikut :

1. Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir-miskin lebih terjamin haknya.
2. Perasaan fakir-miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti meminta – minta.
3. Pembagian zakat akan menjadi lebih tertib.

<sup>55</sup> Achmad Subianto, *Sadaqah, Infak dan Zakat Sebagai Instrumen Untuk Membangun Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Benar*, (Jakarta : Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004) h. 7

<sup>56</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekabaru :Suska Press, 2014)h.19



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah misalnya, dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.<sup>57</sup>

Salah satu ide terbesar dalam tata kelola yang tertuang dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2011 adalah tentang pengelolaan zakat yang terintegrasi. Integrasi yang dimaksud dalam undang – undang sangat berbeda dengan sentralisasi. Menurut undang – undang, zakat yang telah terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>58</sup>

Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolaannya.<sup>59</sup>

#### b. Inklusi Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar agama Islam. Paling tidak terdapat tiga kelompok yang terlibat dalam gerakan zakat, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan menunaikan zakat (muzaki), kelompok pengelola dan pegiat zakat (golongan amil), serta kelompok masyarakat yang tidak mampu yang termasuk kedalam delapan asnaf penerima zakat (mustahik). Saat ini banyak umat Islam yang belum dapat merasakan, menikmati dan menjalankan ibadah zakat.

<sup>57</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 51 -52

<sup>58</sup> Zulkifli, *Op.Cit*, h.22

<sup>59</sup> Hertina, *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*, (Pekanbaru : Suska Press, 2013), h.33





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, pemerintah menggagas *zakat inclusion* sebagai suatu program yang dirancang guna memasyarakatkan zakat secara luas sehingga kegiatan berzakat dapat lebih mudah diakses atau dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, akan dilakukan sinergi antara program *zakat inclusion* dengan program literasi dan inklusi keuangan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, pelayanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki akses keuangan dan program pengentasan kemiskinan secara nasional berbasis dana zakat.<sup>60</sup>

Perlunya pengoptimalan pengelolaan zakat penghasilan dan zakat perusahaan dalam rangka pemberdayaan perekonomian umat, dapat melalui pemanfaatan teknologi baik untuk pengumpulan zakat, penyaluran zakat, dan edukasi zakat kepada masyarakat. Berdasarkan data BAZNAS Tahun 2018, zakat penghasilan di Indonesia berpotensi mencapai Rp 175,97 Triliun namun hanya terkumpul sejumlah Rp 2,79 triliun. Adapun zakat perusahaan yang berpotensi mencapai Rp 248,5 triliun hanya terkumpul sejumlah Rp 307 miliar. Adapun potensi zakat untuk Tahun 2019 mencapai Rp 235,156 triliun.<sup>61</sup>

Peluncuran gagasan inklusi zakat dilakukakn oleh Presiden Joko Widodo, bersama BAZNAS dan OJK pada tanggal 14 Juni 2017 di Istana Negara. Gagasan zakat inklusi adalah sebuah upaya mengajak sebanyak mungkin lapisan masyarakat untuk ikut dalam kampanye zakat dan

<sup>60</sup> Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *op.cit.* h. 222

<sup>61</sup> Juwita Lukytasari Putri, *Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) 2018*, Buletin SNKI Edisi XI, Desember 2018. h 4



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi agen zakat bagi masyarakat di semua lapisan. Salah satu langkah yang ditempuh untuk mendukung hal itu adalah dengan memulai program penghimpunan zakat melalui ratusan ribu agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).<sup>62</sup>

Dalam Masterplan Arsitektur Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI), yang dirilis oleh BAPPENAS, zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Religious Financial Sector. Keberadaan zakat dalam kerangka ini menjadi komplemen penyempurna yang tidak dimiliki oleh model keuangan konvensional. Penguatan ekonomi syariah tidak bisa terlepas dari pertumbuhan pengelolaan zakat di Indonesia. Hadirnya karakteristik aktivitas ekonomi syariah yang berkualitas diharapkan memberikan implikasi positif bagi perekonomian, antara lain: akses sumberdaya ekonomi yang merata, dorongan implementasi konsep bagi hasil, harmonisasi sektor keuangan dan sektor riil, investasi berkelanjutan dan bertanggung jawab, praktek ekonomi yang berhati-hati, dan pemenuhan prinsip syariah. Praktik dari semua ini muaranya adalah bagaimana tujuan pembangunan dan ekonomi syariah itu bisa terwujud yakni: mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.<sup>63</sup>

Geliat ekonomi syariah yang mulai menemukan momentumnya dan gaung inklusi dalam sektor keuangan menandakan bahwa zakat

<sup>62</sup> <http://presidenri.go.id/berita-aktual/peluncuran-gagasan-zakat-inklusi.html>, diakses pada tanggal 29 juli 2019

<sup>63</sup> Pusat Kajian Strategi (Puskas) BAZNAS, "Pembangunan Keuangan Inklusif di Indonesia" Outlook Zakat 2017, Cetakan I desember 2016, h. 52



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki peranan yang penting. Setidaknya, ada empat peran yang dapat dilakukan oleh zakat dalam pembangunan ini, yaitu: (1) memoderasi kesenjangan sosial; (2) membangkitkan ekonomi kerakyatan; (3) mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan; dan (4) mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Keempat peran tersebut akan dijabarkan secara terperinci sebagai berikut.<sup>64</sup>

Pertama, peran moderasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan oleh zakat tampak secara konkret dalam distribusi harta dari para wajib zakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik), dengan amil zakat sebagai perantara. Dengan redistribusi harta nontransaksional ini, zakat secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan kemakmuran antara golongan kaya dan golongan miskin. Implementasi zakat secara benar diyakini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada selama ini. Kedua, peran kebangkitan ekonomi kerakyatan merupakan agenda zakat yang secara bahasan bermakna tumbuh dan berkembang. Penyaluran zakat kepada mustahik memiliki agenda untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat karitatif maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Pemberdayaan mustahik

<sup>64</sup> Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, "Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Inklusif di Indonesia" Outlokk Zakat 2017, Cetakan I desember 2016, h. 53



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin dan membangkitkan ekonomi kerakyatan.

Ketiga, zakat memiliki peran dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini merupakan program belas kasih dari pemerintah kepada orang-orang miskin. Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah sangat bergantung pada keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan zakat yang merupakan syariat wajib yang harus ada dalam kehidupan umat Islam. Dengan demikian, zakat memiliki kerangka filosofi yang lebih jangka panjang dan dengannya diharapkan mampu mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Keempat, zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Jika selama ini program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kucuran dana pemerintah, maka sejatinya, umat Islam di Indonesia memiliki potensi dana Rp 286 triliun setiap tahunnya yang dapat dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang yang tidak berdaya dalam delapan ashnaf (kategori) mustahik. Jika dapat dioptimalkan, maka potensi dana zakat ini dapat menjadi pelengkap agenda program





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.<sup>65</sup>

## D. Inklusi Keuangan

### a. Pengertian Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan terdiri dari kata inklusi dan keuangan. secara bahasa inklusi dapat diartikan sebagai memasukkan, sedangkan keuangan secara bahasa diartikan dengan beberapa hal yang berhubungan dengan uang. Apabila kedua kata tersebut digabungkan memiliki arti yang baru, yang berhubungan dengan sebuah rencana global.

Inklusi keuangan dalam pandangan Islam merupakan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan agar pendistribusian dan pengelolaan keuangan ditengah – tengah masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya Inklusi keuangan syariah yang dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam praktik keuangan syariah.<sup>66</sup>

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen

<sup>65</sup> Ibid,h. 54.

<sup>66</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*,(Jakarta : Rajawali Press, 2017 ),h. .221



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Pada G20 Pittsburgh *Summit* 2009, anggota G20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada Toronto *Summit* tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 *Principles for Innovative Financial Inclusion* sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Prinsip tersebut adalah *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality*, dan *framework*.

Sejak itu banyak fora-fora internasional yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusif seperti CGAP, World Bank, APEC, Asian Development Bank (ADB), Alliance for Financial Inclusion (AFI), termasuk standard body seperti BIS dan Financial Action Task Force (FATF), termasuk negara berkembang dan Indonesia.<sup>67</sup>

Di Indonesia peraturan presiden keuangan inklusif juga telah masuk dalam 6 prioritas pemerintah Indonesia. Pada bulan Juni 2012, Bank Indonesia bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Strategi ini berisi kerangka kerja,

<sup>67</sup> <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 11 Juli 2019.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi dan langkah kedepan pelaksanaan keuangan inklusif.<sup>68</sup> Selanjutnya diterbitkan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang kini telah di ganti dengan Preraturan Presiden Tentang Keuangan Inklusif No 114 Tahun 2020.

Pada hakikatnya keuangan inklusif adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Belum terdapat definisi baku mengenai keuangan inklusif. Namun demikian, beberapa institusi mempunyai definisi masing – masing.<sup>69</sup>

- a. World Bank mendefinisikan keuangan inklusif sebagai proporsi individu dan perusahaan yang menggunakan produk dan jasa keuangan.
- b. IMF mendefinisikannya sebagai akses dan penggunaan produk keuangan formal.
- c. **Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)** mendefinisikan keuangan inklusif sebagai “*process of promoting affordable, timely and adequate access to a wide range of regulated financial products and services and broadening their use by all segments of society through the implementation of*

<sup>68</sup> Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*, h. 6

<sup>69</sup> Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), h. 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*tailored existing and innovative approaches including financial awareness and education with a view to promote financial well-being as well as economic and social inclusion”*

- d. OJK mendefinisikan inklusi keuangan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Strategi Nasional Keuangan Inklusif mendefinisikan inklusi keuangan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil.

### **b. Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif**

Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini menyasar kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif secara eksplisit menyasar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) dan tiga lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal).<sup>70</sup>

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas dalam strategi nasional keuangan inklusif 2016 sesuai dengan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2016 mengalami sedikit perbedaan. Keuangan inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal yaitu :

1. Masyarakat berpendapatan rendah. Masyarakat berpendapatan rendah kelompok masyarakat 40% berpendapatan terendah berdasarkan basis data terpadu yang bersumber dari hasil kegiatan pendataan program perlindungan sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh badan pusat statistik. Kelompok ini memiliki akses terbatas atau tanpa akses sama sekali kesemua layanan keuangan yang mencakup masyarakat penerima bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat dan wirausaha yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha.

<sup>70</sup>Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*, h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaku usaha mikro dan kecil, melakukan pelaku usaha sesuai dengan Undang – Undang No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Kategorisasi usaha kecil dan menengah tersebut dilakukan berdasarkan aset bersih dan nominal penjualan dalam setahun.
3. Masyarakat lintas kelompok, yaitu pekerja migran, wanita, masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau – pulau terluar dan pelajar, mahasiswa dan pemuda.<sup>71</sup>

**c. Indikator Keuangan Inklusif**

Untuk mengukur tingkat inklusi keuangan terdapat 3 indikator, yaitu :

1. Indikator akses, mencerminkan kedalaman jangkauan layanan keuangan, seperti penetrasi cabang di daerah pedesaan, atau hambatan sisi permintaan yang dihadapi pelanggan untuk mengakses lembaga keuangan, seperti biaya atau informasi.
2. Indikator penggunaan, mengukur bagaimana klien menggunakan jasa keuangan, seperti keteraturan dan durasi penggunaan produk/jasa keuangan dari waktu ke waktu (misalnya rata – rata saldo tabungan, jumlah transaksi per rekening, jumlah pembayaran elektronik yang dibuat).

<sup>71</sup> Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), h.137 - 138



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Indikator kualitas, menjelaskan apakah produk dan jasa keuangan telah sesuai dengan kebutuhan konsumen, berbagai pilihan yang tersedia, dan kesadaran dan pemahaman klien terhadap produk dan jasa keuangan.<sup>72</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, serta persamaan dan perbedaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 2.1**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

No	Peneliti/Tahun Penelitian	Judul	Hasil
1	Lina Marlina dan Biki Zulkifri Rahmat 2018	Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya	Usaha yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Tasikmalaya untuk mengimplementasikan inklusi keuangan sudah cukup banyak, seperti diberikan produk, program pembiayaan untuk pelaku usaha UMKM. Dalam menerapkan keuangan inklusif terdapat hambatan dari sumber daya manusia serta kantor layanan yang terbatas, kemudian terkendala dari agunan sebagai <i>second way out</i> untuk tetap menjaga keamanan dalam transaksi pembiayaan, pelayanan yang masih kurang maksimal, pinjaman instant menjadi pilihan masyarakat, kemudian pandangan masyarakat yang tidak mau melakukan

<sup>72</sup> Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Loc. cit*, h. 112.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			transaksi keuangan di LKS karena akan direpotkan dengan berbagai persyaratan.
	<b>PERSAMAAN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif</li> </ul>
	<b>PERBEDAAN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga keuangan yang diteliti adalah BMT dan Baznas</li> <li>Tidak hanya terfokus pada pembiayaan tetapi juga pengumpulan dana</li> <li>Tahun penelitian 2019</li> </ul>
	2	FINITA RAHMADANI DAN NUR EKA SETIOWATI 2017	Pengaruh Program Inklusi Keuangan BMT Al- Falah Terhadap Transaksi Rentenir
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		<b>PERSAMAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui Pelaksanaan Program Inklusi Keuangan Di BMT</li> </ul>
		<b>PERBEDAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui upaya yang dilakukan BMT untuk mengumpulkan dan pembiayaan kepada masyarakat sekitar</li> <li>Mengetahui upaya BAZNAS sebagai lembaga keuangan syariah yang mengelola zakat dalam meningkatkan jumlah Muzakki dan Mustahik yang mendapatkan manfaat dana zakat</li> <li>Tahun penelitian 2019</li> </ul>
	3	HARIANTO WIJAYA M 2016	Fungsi Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro
			Hasil dari penelitian ini KJKS Satmakura Halal belum melaksanakan fungsi intermediasi





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		Syariah Dalam Pemberdayaan Masyarakat.	disebabkan oleh masalah internal lembaga tersebut, dimana seluruh dana yang ada disetor dan digunakan untuk kantor pusat. Hal ini menyebabkan anggota sulit mendapatkan pembiayaan, yang artinya KJKS belum melaksanakan fungsi inklusinya.
	<b>PERSAMAAN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat fungsi inklusi keuangan pada BMT</li> </ul>
	<b>PERBEDAAN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat upaya BMT dalam mewujudkan keuangan yang inklusif</li> <li>• Melihat upaya BAZNAS dalam mewujudkan zakat inklusif</li> <li>• Penelitian tahun 2019</li> </ul>
4	Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah dan Ach. Yasin 2017	Inklusi Pembayaran Zakat Di Indonesia	Jumlah orang yang membayar zakat di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang yang wajib berzakat. Selama periode 2006-2015 prosentase wajib zakat yang membayar zakat melalui Badan Amil Zakat kurang dari 0.1%. Hal ini menunjukkan tingkat inklusi pembayaran zakat masyarakat Indonesia masih sangat rendah.
	<b>PERSAMAAN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat inklusi pembayaran zakat doi badan amil zakat</li> </ul>
	<b>PERBEDAAN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat inklusi zakat tidak hanya dari segi pembayaran tetapi juga penyaluran kepada mustahik</li> <li>• Tempat penelitian BMT dan Baznas Kab. Kampar</li> <li>• Tahun penelitian 2019</li> </ul>
5	Ilham Fadhillah Perdana 2018	Inklusi Pembayaran Zakat Di Provinsi Riau	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat di Provinsi Riau periode 2012 – 2016 selalu mengalami



© Hak cipta milik UIN Suska Riau			peningkatan sejalan dengan semakin banyaknya penduduk dan masyarakat yang membayar zakat. Namun peningkatan penerimaan zakat tidak sebanding dengan jumlah wajib zakat. Dengan persentase wajib zakat yang membayar zakat melalui badan amal zakat kurang dari 0.3%.
	<b>PERSAMAAN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat inklusi pembayaran zakat di Indonesia</li> </ul>
	<b>PERBEDAAN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat tingkat inklusi zakat dari baik dari segi penerimaan maupun penyaluran dana</li> <li>• Tempat penelitian di Kabupaten Kampar</li> <li>• Melihat upaya Baznas Kampar dalam meningkatkan jumlah wajib zakat yang berzakat melalui Baznas</li> <li>• Melihat upaya Baznas Kampar dalam memberdayakan dana zakat kepada mustahik.</li> </ul>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada responden.<sup>73</sup> Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistic, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.<sup>74</sup> Penelitian kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat atau mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu dalam konteksnya, menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi.<sup>75</sup>

#### B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber data primer langsung ketempat yang menjadi sasaran penelitian yaitu BMT Marwah di Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang Km 34, Komplek Pertokoan Terminal Pasar Danau Bingkuang dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Jl. D.I. Panjaitan Gedung Muamalah. Komplek Markaz Islami Kab Kampar.

<sup>73</sup> Etta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2010), h.28.

<sup>74</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Jawa Barat : CV Jejak, 2018),h. 9

<sup>75</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2017), h. 43



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian adalah karyawan BMT Marwah dan pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar periode 2016 – 2021. Sedangkan objek adalah upaya BMT MARWAH dan BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan keuangan inklusif.

### D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama (Key Informan). Key informan dapat diartikan sebagai sumber utama dan sebagai actor yang layak disebut sebagai sumber yang berkompeten dalam suatu hal atau suatu bidang tertentu secara lebih dibandingkan yang lain.<sup>76</sup> Untuk memilih informan kunci lebih tepat digunakan secara sengaja (*purposive sampling*).<sup>77</sup>

Adapun key penelitian ini adalah pimpinan BMT Marwah dan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar. Kemudian selain key informan dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai nasabah BMT Marwah serta muzakki dan mustahik BAZNAS Kabupaten Kampar untuk melakukan triangulasi.

<sup>76</sup> Radita Gota, *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya : Jakad Publishing, 2019), h.

<sup>77</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Sumber Data**

Untuk mengambil data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).<sup>78</sup> Dalam penelitian ini data penulis peroleh dari pengurus BMT Marwah dan BAZNAS Kabupaten Kampar dalam upaya implementasikan keuangan inklusif.
- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>79</sup> Data sekunder umumnya berupa bahan kepustakaan, peraturan perundang – undangan yang tertulis catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak tidak dipublikasikan.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui lima cara yaitu: observasi, perpustakaan, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi yaitu cara mengumpulkan data yang penulis lakukan dengan mengamati gejala – gejala yang ada dilapangan.

<sup>78</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 44

<sup>79</sup> *Loc. Cit.*, h. 44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perpustakaan yaitu penulis memperoleh buku – buku, dan berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Wawancara adalah merupakan teknik pengambilan data ketika peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.<sup>80</sup>
- d. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang.<sup>81</sup>

**G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi yang lain, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Etta Mamang Sangadji, *Op.Cit*, h.191

<sup>81</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h.82.

<sup>82</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Serasin, 1998), cet. 7, h. 124.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada proses analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga tahapan), yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Berikut penjelasan dari tahapan analisis data kualitatif :

a. Reduksi data (*data reduction*).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Pada tahapan ini data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti pada tahapan selanjutnya. Pada teknik ini, data – data diperoleh dari para informan dan responden yang kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>83</sup>

b. Penyajian data (*data display*).

Tahapan selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. Pada tahapan ini, penyajian data dilakukan peneliti mengenai upata BMT Marwah dan BAZNAS mengimplementasikan keuangan yang inklusif. Dalam penyajian data, akan disajikan dalam bentuk hasil wawancara dan kemudian dijelaskan lagi secara rinci.

<sup>83</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2008),h. 89.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengambilan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir pada analisis data kualitatif adalah kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang – ulang dan terus menerus.<sup>84</sup>

## H. Rencana Out Line

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, penulis membagi dalam bentuk bab – bab yaitu sebanyak 5 bab dengan tujuan mempermudah penulisan penelitian. Dengan kerangka dasar sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
  - a. Identifikasi Masalah
  - b. Batasan Masalah
  - c. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Sistematika Pembahasan

### BAB II : LANDASAN TEORITIS

- A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah
- B. BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*)
  - a. Pengertian BMT dan Sumber Hukum

<sup>84</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi, 2010),h.210



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Peran BMT

c. Pemasaran BMT

**C. Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

a. Lembaga Amil Zakat Di Indonesia dan Sumber Hukum

b. Inklusi Zakat

**D. Inklusi Keuangan**

a. Pengertian Inklusi Keuangan

b. Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif

c. Indikator Keuangan Inklusif

**E. Penelitian Terdahulu**

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis penelitian

B. Tempat penelitian

C. Subjek dan objek penelitian

D. Informan penelitian

E. Sumber data

F. Teknik pengumpulan data

G. Teknik analisis data

H. Rencana out line

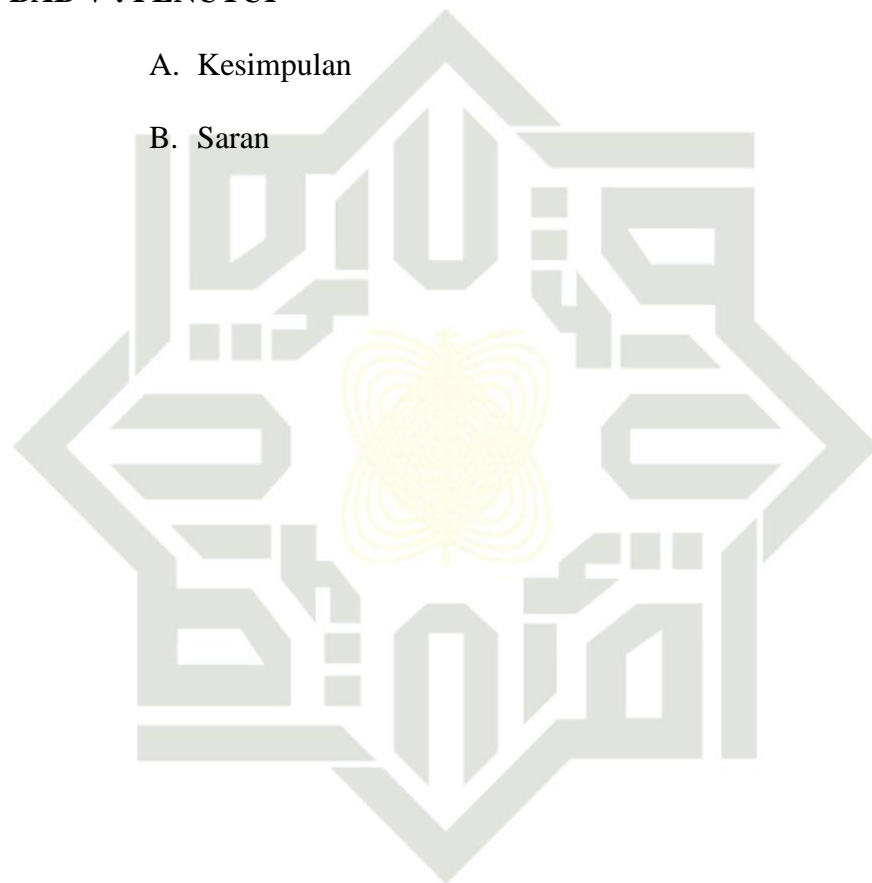
**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

A. Upaya Bmt Marwah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif

- B. Upaya Baznas Kabupaten Kampar Dalam Mengimplementasikan Zakat Inklusif
- C. Hambatan Dan Solusi Bmt Marwah Dan Baznas Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif.

## BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Upaya BMT dalam mengimplementasikan keuangan inklusif adalah dengan memberikan produk – produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pesryaratan yang mudah, kejelasan pencatatan setiap transaksi. Berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sebagai upaya untuk mengenalkan produk, meningkat kepercayaan masyarakat sekitar dan pelayanan yang diberikan kepada nasabah atau calon nasabah. Akan tetapi pembiayaan mudharabah diberhentikan untuk sementara dikarenakan anggota pembiayaan sulit untuk menyelesaikan pembiayaannya.
2. Upaya BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan keuangan inklusif dilakukan dengan berbagai cara untuk meningkatkan pengumpulan zakat dengan cara sosialisasi, pembentukan UPZ, advokasi dan pelayanan zakat. Dengan cara ini diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan muzaki untuk berzakat di BAZNAS sehingga jumlah zakat yang terkumpul semakin besar dan dapat dimanfaatkan mustahik. Melalui pendistribusian zakat mustahik yang telah mendapatkan manfaat zakat. Bagi yang sebelumnya kesulitan memenuhi kebutuhan pokok terbantu dengan adanya zakat konsumtif, mustahik yang sebelumnya memiliki usaha tetapi terkendala modal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha maka terbantu dengan adanya zakat konsumtif.

3. Berbagai hambatan ditemui dalam upaya mengimplementasikan keuangan inklusif baik oleh BMT maupun BAZNAS, akan tetapi BMT dan BAZNAS mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi hambatan tersebut.

**B. SARAN**

1. Sebaiknya BMT lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan produk – produk penghimpunan, pembiayaan maupun jasa yang dimiliki. Sehingga masyarakat tidak lagi memiliki persepsi bahwa BMT, lembaga konvensional maupun rentenir sama.
2. Membuat suatu aturan untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan mudharabah.
3. BMT Marwah sebaiknya meningkatkan pengawasan kepada anggota yang mendapatkan pembiayaan baik mudharabah atau murabahah.
4. Mengenalkan fintech kepada anggota dan memanfaatkannya agar anggota tidak hanya mengandalkan system jemput bola yang ada di BMT
5. Meningkatkan kinerja pada pengumpulan zakat, infak dan sedekah sebagai salah satu tugas sebagai baitul maal. Sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan manfaat.
6. BAZNAS sebaiknya meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam penghimpunan zakat.



7. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan tambahan biaya operasional sehingga tidak lagi tergantung pada dana amil.
8. Membangun komunikasi yang lebih baik kepada wajib zakat ataupun mustahik.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2017)
- Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung : Alfabeta, 2010)
- Chofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok : Rajawali Press, 2017)
- Subianto, *Sadaqah, Infak dan Zakat Sebagai Instrumen Untuk Membangun Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Benar*, (Jakarta : Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004)
- Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2013)
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018)
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2017)
- Iskandar, *Index Of Syariah Financial Inclusion In Indonesia*, bulletin ekonomi moneter dan perbankan. Vol. 20, No 1, Juli 2017, h.103.
- Hermanto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008)
- Keuangan Inklusif, (Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM: Bank Indonesia, 2014)
- BPS Kabupaten Kampar, <https://kamparkab.bps.go.id/indicator/12/40/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>, (diakses pada tanggal 8 Juli 2019)
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008)
- Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*,
- Dicki Hartanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Konsep Umum dan Syariah*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012)
- Etta Marwan Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi, 2010)
- Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)
- Hertina, *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*, (Pekanbaru : Suska Press, 2013)



<http://presidenri.go.id/berita-aktual/peluncuran-gagasan-zakat-inklusi.html>, diakses pada tanggal 29 juli 2019

<http://www.mozaikislam.com/189/sifat-peran-dan-fungsi-bmt.htm>, di akses pada tanggal 10 Juli 2019.

<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 11 Juli 2019.

Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*(Jakarta : Kencana, 2015)

Idris Syaqui Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2017)

Idris Lukytsari Putri, *Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) 2018*, Buletin SNKI Edisi XI, Desember 2018. h 4

Kusumaningkti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*,(Depok : Rajawali Press, 2018)

M. Fahim Khan, Suherman Rosyidi, *Esai – Esai Ekonomi Islam*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014) Cet. ke – 1

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*,(Jakarta : Kencana, 2015)

Muhammad , *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009)

Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *al- Jami' al- Musnad Imam al- Bukhari* (Daruu Tauqiq an- Najaah,1422 H), Cet. 1, 3: 140.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*,(Jakarta: UI Press, 2012)

Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam*,(Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014)

Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,(Jakarta : Kencana, 2010), cet. Ke – 3

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,( Yogyakarta : Rake Serasin, 1998), cet. 7

Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*,(Jakarta : PT Rajagrafindo, 2006)

Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*,(Jakarta : Kencana, 2010)

Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*,(Jakarta : Kencana , 2012)

Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*,( Jakarta : Amzah, 2016)

Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*,(Jakarta : Kencana, 2015)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saifudin Syarifudin Karami Riau





Radita Gota, *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya : Jakad Publishing, 2019)

Dubandji, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung : Alfabeta, 2016)

Supriyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012)

Mukron Kamil, *Ekonomi Islam Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)

Mukron Kamil, *Ekonomi Islam Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016)

Syaamil Al – Qur'an, *Syaamil Al – Qur'an Terjemahan*, (Bandung : Syaamil Al – Quran, 2010)

Undang – Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (1)

Wan Ulfa Nur Zuhra, *Bumerang Inklusi Keuangan*, <https://tirto.id/bumerang-inklusi-keuangan-ck1g>, (diakses tanggal 4 november 2019)

Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006)

Mulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekabaru :Suska Press, 2014)

## WAWANCARA

Wawancara, Anggota BMT, tanggal 06 Februari 2020

Wawancara, Bendahara Gaji Dinas Pertanian, Rosma,, 28 Januari 2020.

Wawancara, Ka. Operasional, Shapyani, tanggal 06 Februari 2020

Wawancara, Kepala Kantor Cabang Utama, Dodi Hendra Saputra, tanggal 06 Februari 2020.

Wawancara, Mustahik BAZNAS Kab. Kampar, Eni, 14 Maret 2020

Wawancara, Mustahik BAZNAS Kab. Kampar, Nanik , tanggal 14 Maret 2020

Wawancara, Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Hendri Putra, tanggal 19 Februari 2020

Wawancara, Staff Bidang Pengumpulan, Abu Bakar H, tanggal 27 Januari 2020.

Wawancara, Wakil Ketua I Bidang pengumpulan, Abazua Anwar, tanggal 27 Januari 2020.

Wawancara, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ahmad Fauzi Hasan, 19 Februari 2020.





# PERANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF (STUDI PADA BMT MARWAH DAN BADANAMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR)

## PEDOMAN WAWANCARA BMT MARWAH

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### A. BIMPINAN

1. Kapan BMT Marwah mulai berdiri ?
2. Apa visi dan misi BMT Marwah ?
3. Berapa modal awal pendirian BMT Marwah ?
4. Siapa saja dan berapa jumlah nasabah BMT Marwah sampai sekarang?
5. Apa saja produk Funding BMT Marwah ?
6. Apa saja produk Financing BMT Marwah ?
7. Apa upaya BMT Marwah untuk memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan terjangkau bagi nasabah maupun calon nasabah ?
8. Bagaimana BMT Marwah mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah ?
9. Apa yang bapak ketahui tentang inklusi keuangan syariah?
10. Apa hambatan yang dihadapi BMT Marwah ?
11. Apa rencana BMT Marwah untuk kedepannya agar menjadi lembaga keuangan syariah yang mudah, murah dan aman bagi masyarakat?

#### B. FUNDING

1. Apa saja produk funding BMT Marwah?
2. Bagaimana cara menjadi nasabah bmt ?
3. Apa upaya untuk meningkat jumlah nasabah ?
4. Apa hambatan dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah ?

#### C. FINANCING

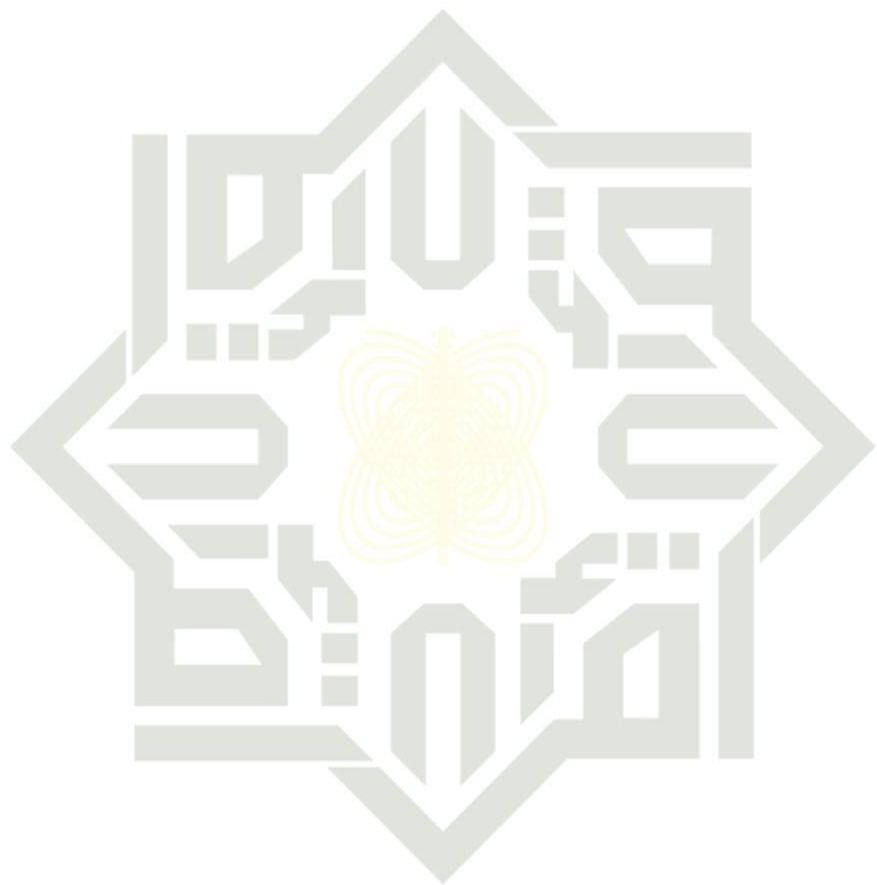
1. Apa saja produk financing ?
2. Bagaimana cara mengajukan pembiayaan?
3. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil?
4. Bagaimana cara menghadapi anggota yang bermasalah dalam pembiayaan ?

#### D. ANGGOTA

1. Sudah berapa lama bapak/ibuk menjadi anggota BMT Marwah?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dari mana bapak/ibuk mengetahui BMT Marwah ?
  3. Apa alasan bapak/ibuk menjadi anggota BMT Marwah?
  4. Apa persyaratan menjadi anggota BMT Marwah ?
- Apakah produk BMT Marwah sudah sesuai dengan kebutuhan?
- Bagaimana pelayanan BMT Marwah?
- Apa manfaat yang bapak/ibu dapatkan setelah menjadi anggota BMT Marwah?



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN KAMPAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. PIMPINAN

1. Apa yang bapak ketahui tentang inklusi zakat?
2. Apakah inklusi zakat sudah diterapkan untuk seluruh Baznas di Indonesia?
3. Menurut bapak apakah
4. Apa hambatan yang ada di lapangan untuk meningkatkan pengumpulan zakat?
5. Apa solusi sehingga pengumpulan zakat meningkat dan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat?

B. BIDANG PENGUMPULAN

1. Dari mana saja sumber dana zakat ?
2. Bagaimana cara muzakki untuk membayarkan zakatnya?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah muzakki ?
4. Berapa realisasi pengumpulan dana zakat 2015 – 2019?
5. Berapa potensi zakat yang ada di Kabupaten Kampar ?

C. BIDANG PENYALURAN

1. Apa saja program penyaluran zakat yang ada di Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana BAZNAS menentukan mustahik yang berhak menerima zakat ?
3. Berapa lama proses dalam menentukan mustahik ?
4. Bagaimana cara penyaluran zakat ke mustahik?
5. Berapa realisasi penyaluran zakat?
6. Berapa jumlah mustahik yang menerima zakat ?

D. MUZAKKI

1. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui Baznas?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menyalurkan zakat ke Baznas?
3. Mengapa bapak/ibu menyalurkan zakat ke baznas ?
4. Bagaimana cara bapak/ibu menyerahkan zakat?

E. MUSTAHIK

1. Bagaimana cara bapak/ibu bisa mendapatkan zakat dari Baznas?
2. Apa saja syarat untuk mendapatkan zakat ?
3. Apa manfaat yang bapak/ibu dapatkan dari zakat ?



## LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN

sity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

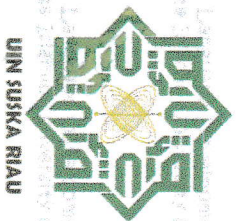
a Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز ترقيّة اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Mifta Hasda

ID Number : 21890320035

Date of Birth : November 07, 1995

Sex : Female

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 67

Structure & Written Expressions : 68

Reading Comprehension : 54

Overall Score : 630

Expired Date : July 21, 2021



*The University of Language Development Center*  
*State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau*  
*English Proficiency Test® Certificate Provided by*  
*Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.*  
*The scores and information presented in this score report are approved.*  
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
HP: 0852 7144 0823 Fax: (0761) 858832  
Email : [info@pusat-bahasa.info](mailto:info@pusat-bahasa.info) Website : [pusat-bahasa.info](http://pusat-bahasa.info)



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag

NIP. 19720421 200604 1 003





LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Mifta Hasda

Nomor ID : 21890320035

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir : 07 November 1995

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

53 : الاستماع

59 : القواعد

55 : القراءة

557 : النتيجة

Berlaku Hingga : 19 Oktober 2021



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP: 0852 7144 0823

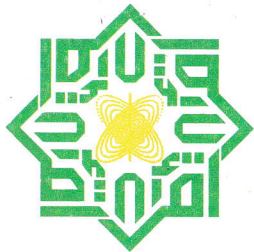
Email : [info@pusat-bahasa.info](mailto:info@pusat-bahasa.info) Website : [pusat-bahasa.info](http://pusat-bahasa.info)



Masyudin Syukri, M. Ag

The Head of Language Development Center





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Nomor : 2511/Un.04/PPs/PP.00.9/2019  
Lamp. : 1 berkas  
Perihal : Izin Melakukan Kegiatan Penelitian Pra Tesis

Pekanbaru, 31 Oktober 2019

Kepada Yth.  
BMT Marwah Dan Badan Zakat Nasional (Baznas)  
Kabupaten Kampar  
Di  
Pekanbaru

Dengan hormat,  
Dalam rangka penulisan tesis, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk  
mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Mifta Hasda
NIM	: 21890320035
Program Pendidikan	: Magister (S2)
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah
Semester	: IV (Empat)
Judul Tesis	: Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif (Studi Pada BMT Marwah Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar

untuk melakukan penelitian sekaligus mengumpulkan data dan informasi yang  
diperlukannya dari BMT Marwah Dan Badan Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten  
Kampar.

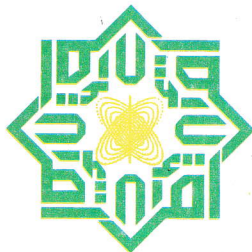
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam  
Direktur,



**Prof. Dr. Afrizal M, MA**

NIP. 19591015 198903 1 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Nomor : 2785/Un.04/PPs/PP.00.9/2019  
Lamp. : 1 berkas  
Perihal : Penunjukan Pembimbing Utama dan  
Pembimbing Pendamping Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 25 November 2019

Kepada Yth.

1. Dr. H. M Said, MM, M. Ag (Pembimbing Utama)
  2. Dr. Julina, SE., M.Si (Pembimbing Pendamping)
- di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n.:

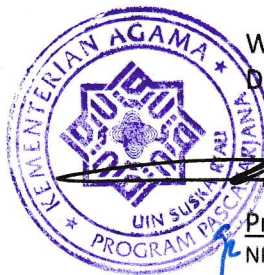
Nama	: Mifta Hasda
NIM	: 21890320035
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Semester	: IV (empat)
Judul Tesis	: Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif ( Studi Pada BMT Marwah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,  
Direktur,

Prof. Dr. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/29560  
T E N T A N G

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 30/Un.04/PPs/PP.00.9/2020 Tanggal 3 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **MIFTA HASDA**
2. NIM / KTP : **21890320035**
3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
4. Konsentrasi : **EKONOMI SYARIAH**
5. Jenjang : **S2**
6. Judul Penelitian : **PERANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF (STUDI PADA BMT MARWAH DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR)**
7. Lokasi Penelitian :
  1. **BMT MARWAH KABUPATEN KAMPAR**
  2. **BAZNAS KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 10 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

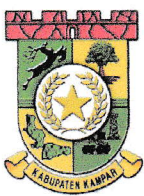
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG KOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2020/37

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29560 tanggal 10 Januari 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **MIFTA HASDA**
2. NIM : 21890320035
3. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
5. Konsentrasi : EKONOMI SYARIAH
6. Jenjang : S2
7. Alamat : PEKANBARU
8. Judul Penelitian : **PERANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF (STUDI PADA BMT MARWAH DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR)**
9. Lokasi : 1.BMT MARWAH KABUPATEN KAMPAR  
2.BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 13 Januari 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Pimpinan BMT Marwah Kabupaten Kampar.
2. Kepala Baznas Kabupaten Kampar di Bangkinang.
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.





## **BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 037/BAZNAS-KPR/III/2020

Tentang

### **PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/BKBP/2020/37, Hal Pra Riset tanggal 13 Januari 2020, dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :


Nama	:	<b>MIFTA HASDA</b>
NIM	:	21890320035
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Jenjang	:	S2
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	<b>PERANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF (STUDI PADA BMT MARWAH DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR)</b>
Lokasi	:	1. BMT MARWAH KABUPATEN KAMPAR 2. BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 12 Maret 2020

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KAB. KAMPAR

Ketua



Ir. H. BASRI RASYID, MM, MT



**BMT MARWAH**

KSPPS BAITUL MAL WAT TAMWIL

Tambang, 23 Januari 2020

No : 292/SR-PM/BMT-Marwah/I/2020  
Hal : **Persetujuan Pra Riset / Riset**  
Lam : -

Kepada Yth :  
**MIFTA HASDA**  
Di,  
Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Permohonan pra riset yang telah saudara sampaikan kepada kami, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : MIFTA HASDA  
NIM : 21890320035  
Program Studi : Pasca Sarjana Ekonomi Syariah  
Jenjang : S2  
Semester : : IV ( Empat )


Mahasiswa/i tersebut **Disetujui** untuk melakukan riset untuk proposal penelitian di BMT MARWAH dengan judul **"PERANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF (STUDI PADA BMT MARWAH DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR) "**.

Demikianlah surat persetujuan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BMT MARWAH  
  
**M. WALI FAHIMI, S.Ag**  
Manager BMT MARWAH

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : MIETA HASDA  
NIM : 21896322035  
PROGRAM : PASCA SARJANA  
PRODI : EKONOMI SYARIAH  
KONSENTRASI :

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
		Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha mikro mustahik dari penyaluran zakat produktif pada BAZNAS kabupaten Kampar		DIANY MAIRIZA
		Studi komperatif tentang peran customer servis dan kepuasan terhadap loyalitas nasabah BSM dengan BNI di Kota Rengat kabupaten Indragiri Hulu		MUHAMMAD YUSUF
		Pengaruh capital Adequacy Ratio, non performing Financing, BI Rate dan Dana pihak ketiga terhadap Financing to Deposite Ratio pada Bank Pembiayaan Rakyat (BERS) di Indonesia		

Pekanbaru, \_\_\_\_\_ 2018  
Direktur









**Prof. Dr. Afrizal, M., MA**  
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



## KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISSERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	02/Des 2015	Perbaikan penulisan daftar pustaka serta koreksi wawancara		
2.	07/Jan 2020	Data yg bisa diperoleh melalui bekas wawancara awal ada di daftar wawancara		
3.	4/September 2020	Revisi BAB IV Footnote wawancara dilengkapi		
4.	18/September 2020	Perbaikan penulisan pada BAB IV dan BAB V		
5.	02/Oktober 2020	Lengkapi hasil wawancara serta mawah tambah lampiran dokumentasi wawancara.		
6.	09/Oktober 2020	Ace untuk diujikan.		

Pekanbaru 2020

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 09 / Okt / 2020

~~Pembimbing I/Propotor\*\*~~

## Pembimbing II/ So Promotor\*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**MIFTA HASDA**, lahir di Kuok pada tanggal 7 November 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan ayahanda Drs. H. Darlis dan ibunda Hazlinda. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Muhammadiyah Bangkinang, lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah Bangkinang, lulus pada tahun 2010. Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Ekonomi Islam Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan judul “UPAYA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR DALAM PEMBERDAYAAN POTENSI ZAKAT KABUPATEN KAMNPAR”. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 26 Juli 2017 jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3,73 dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E). Tahun 2018 penulis melanjutkan studi Pasca Sarjana UIN SUSKA RIAU jurusan Ekonomi Syariah menyelesaikan tesis dengan judul “PERANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF STUDI PADA BMT MARWAH DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR)”